



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

**PERJANJIAN KINERJA
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2019**

**BAGIAN ORGANISASI SETDAKO PADANG PANJANG
TAHUN 2019**



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PERJANJIAN KINERJA

KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2019

SARJAN ORGANISASI SETDAKO PADANG PANJANG
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamiin puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan izin-Nya penyusunan Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2019 dapat diselesaikan. Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2019 merupakan salah satu dokumen yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2015

Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2019 ini disusun mengacu pada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Padang Panjang yang telah ditetapkan serta menyesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2019 dan Perwako Nomor 39 Tahun 2019.

Dokumen Perjanjian Kinerja ini merupakan kesepakatan kinerja antara Kepala Daerah dengan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh OPD sesuai dengan dokumen perencanaan daerah.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan bagi penyelesaian penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan ini, dengan harapan kiranya hal ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemerintahan dan pembangunan Kota Padang Panjang

Padang Panjang, 11 Maret 2019
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

185 186 187 188 189 190

185
186
187
188
189
190

191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang	1
1.1 Dasar Hukum	2
1.2 Pengertian dalam Perjanjian Kinerja	2
1.3 Tujuan Perjanjian Kinerja	4
1.4 Ruang Lingkup Perjanjian Kinerja	5
1.5 Keterkaitan dengan Sistem AKIP	5
1.6 Format Perjanjian Kinerja	5
1.7 Sistematika Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019	6
BAB II STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI	8
2.1 Sekretariat Daerah	8
2.2 Sekretariat DPRD	8
2.3 Inspektorat Kota	9
2.4 Dinas Daerah	9
2.5 Badan Daerah Kota	11
2.6 Kecamatan	12
BAB III RENCANA STRATEGIK	15
3.1 Visi	15
3.2 Misi	16
3.3 Tujuan	16
3.4 Sasaran	17
BAB IV PERJANJIAN KINERJA	19
4.1 Pernyataan Perjanjian Kinerja Kota	19
4.2 Perjanjian Kinerja Kota	19
BAB V PENUTUP	27
LAMPIRAN	
Pernyataan Perjanjian Kinerja OPD	
Perjanjian Kinerja OPD	



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Handwritten text at the top right.

Handwritten section header.

Main body of handwritten text in the first section.

Handwritten section header.

Main body of handwritten text in the second section.

Handwritten section header.

Main body of handwritten text in the third section.

Handwritten section header.

Main body of handwritten text in the fourth section.

Handwritten section header.

Main body of handwritten text in the fifth section.

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dokumen Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja ini merupakan salah satu bentuk implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Daerah diamanatkan pada setiap tahun semua instansi pemerintahan sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut Peraturan tersebut, Pemerintah Kota Padang Panjang berkewajiban menyusun dan menyampaikan perjanjian kinerjanya kepada instansi berwenang. Secara teknis, penyusunan Perjanjian Kinerja, tidak hanya untuk Pejabat Struktural tingkat atas seperti pejabat setingkat Eselon II, namun juga untuk Pejabat Eselon III dibawahnya. Dengan demikian, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, wajib menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja.

Perjanjian Kinerja ini mengacu pada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Selain itu, Perjanjian Kinerja ini juga mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2019.

diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian Kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimilikinya. Setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019.

- 2) Pernyataan Perjanjian Kinerja merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan instansi/unit kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu.
- 3) Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
- 4) Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan.
- 5) Pemantauan kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan program atau kegiatan dengan menggunakan informasi: (1) hasil pengukuran kinerja dan (2) identifikasi, analisis sertaantisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
- 6) Instansi Pemerintah adalah sebuah kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi Kementerian Koordinator/Kementerian Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota serta lembaga-lembaga pemerinrtah yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- 7) Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih baik spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

... dan juga... oleh sebab itu... pemerintah...
... dan juga... oleh sebab itu... pemerintah...
... dan juga... oleh sebab itu... pemerintah...
... dan juga... oleh sebab itu... pemerintah...

2) ... dan juga... oleh sebab itu... pemerintah...
... dan juga... oleh sebab itu... pemerintah...

3) ... dan juga... oleh sebab itu... pemerintah...
... dan juga... oleh sebab itu... pemerintah...
... dan juga... oleh sebab itu... pemerintah...

4) ... dan juga... oleh sebab itu... pemerintah...
... dan juga... oleh sebab itu... pemerintah...

5) ... dan juga... oleh sebab itu... pemerintah...
... dan juga... oleh sebab itu... pemerintah...
... dan juga... oleh sebab itu... pemerintah...

6) ... dan juga... oleh sebab itu... pemerintah...
... dan juga... oleh sebab itu... pemerintah...

7) ... dan juga... oleh sebab itu... pemerintah...
... dan juga... oleh sebab itu... pemerintah...
... dan juga... oleh sebab itu... pemerintah...

8) ... dan juga... oleh sebab itu... pemerintah...
... dan juga... oleh sebab itu... pemerintah...

- 8) Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indikator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
- 9) Target kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun tertentu.
- 10) Indikator Kinerja maksudnya adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan, indikator kinerja dapat berupa output maupun outcome.
- 11) Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBD dan/atau APBD.
- 12) Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada satu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
- 13) Unit kerja Mandiri adalah unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah yang memiliki dan mengelola sendiri sumber daya berupa sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana yang ada di lingkungannya.

1.3 Tujuan Perjanjian Kinerja

Adapun yang menjadi tujuan umum dari Perjanjian Kinerja ini adalah :

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- 2) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

1. Tujuan dan Misi: Menetapkan tujuan jangka panjang dan misi organisasi yang akan diwujudkan.

2. Analisis Lingkungan: Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan.

3. Strategi: Menentukan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan organisasi.

4. Rencana Operasional: Menetapkan rencana operasional yang akan dilaksanakan untuk mendukung strategi.

5. Pengendalian: Melakukan pengendalian untuk memastikan bahwa organisasi berjalan sesuai dengan rencana.

6. Evaluasi: Melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai kinerja organisasi dan melakukan perbaikan.

7. Komunikasi: Melakukan komunikasi yang efektif untuk memastikan bahwa semua karyawan memahami visi dan misi organisasi.

8. Sumber Daya Manusia: Melakukan manajemen sumber daya manusia yang efektif untuk memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya yang diperlukan.

9. Keuangan: Melakukan manajemen keuangan yang efektif untuk memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya keuangan yang diperlukan.

10. Teknologi: Melakukan manajemen teknologi yang efektif untuk memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya teknologi yang diperlukan.

11. Lingkungan: Melakukan manajemen lingkungan yang efektif untuk memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya lingkungan yang diperlukan.

12. Sosial: Melakukan manajemen sosial yang efektif untuk memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya sosial yang diperlukan.

13. Budaya: Melakukan manajemen budaya yang efektif untuk memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya budaya yang diperlukan.

14. Inovasi: Melakukan manajemen inovasi yang efektif untuk memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya inovasi yang diperlukan.

15. Keberagaman: Melakukan manajemen keberagaman yang efektif untuk memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya keberagaman yang diperlukan.

16. Keberlanjutan: Melakukan manajemen keberlanjutan yang efektif untuk memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya keberlanjutan yang diperlukan.

17. Kualitas: Melakukan manajemen kualitas yang efektif untuk memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya kualitas yang diperlukan.

18. Keamanan: Melakukan manajemen keamanan yang efektif untuk memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya keamanan yang diperlukan.

19. Kepatuhan: Melakukan manajemen kepatuhan yang efektif untuk memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya kepatuhan yang diperlukan.

- 5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sedangkan tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sehingga terdapat keseriusan dalam menjalankan amanah tersebut.
- 2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
- 3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- 4) Sebagai salah satu dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

1.4 Ruang Lingkup Perjanjian Kinerja

Ruang lingkup Perjanjian Kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang, dengan fokus utama adalah berbagai program utama yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2018 sesuai dengan RPJMD Kota Padang Panjang. Disamping itu juga ditetapkan program utama dari OPD yang meliputi program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu-isu strategis yang sedang dihadapi organisasi atau tantangan kedepan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas.

1.5 Keterkaitan dengan Sistem AKIP

Pada dasarnya, Perjanjian Kinerja merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Perjanjian Kinerja adalah bagian penting transparansi pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Dengan adanya penyusunan perjanjian kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

1.6 Format Perjanjian Kinerja Perjanjian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

di Petrus yang telah diangkat sebagai kepala petrus.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- 1) Petrus diangkat sebagai kepala petrus karena ia adalah orang yang pertama kali mengakuinya sebagai Tuhan dan menyatakan kesetiaannya kepadanya dalam menyatakan simpanan.
- 2) Petrus diangkat sebagai kepala petrus karena ia adalah orang yang pertama kali mengakui Yesus sebagai Tuhan dan menyatakan kesetiaannya kepadanya.
- 3) Petrus diangkat sebagai kepala petrus karena ia adalah orang yang pertama kali mengakui Yesus sebagai Tuhan dan menyatakan kesetiaannya kepadanya.
- 4) Petrus diangkat sebagai kepala petrus karena ia adalah orang yang pertama kali mengakui Yesus sebagai Tuhan dan menyatakan kesetiaannya kepadanya.

1.4. Peran Petrus dalam Gereja Katolik

Petrus diangkat sebagai kepala petrus karena ia adalah orang yang pertama kali mengakuinya sebagai Tuhan dan menyatakan kesetiaannya kepadanya. Peran Petrus dalam Gereja Katolik sangat penting karena ia adalah orang yang pertama kali mengakui Yesus sebagai Tuhan dan menyatakan kesetiaannya kepadanya. Peran Petrus dalam Gereja Katolik sangat penting karena ia adalah orang yang pertama kali mengakui Yesus sebagai Tuhan dan menyatakan kesetiaannya kepadanya.

1.5. Petrus sebagai Kepala Gereja

Petrus diangkat sebagai kepala petrus karena ia adalah orang yang pertama kali mengakuinya sebagai Tuhan dan menyatakan kesetiaannya kepadanya. Peran Petrus dalam Gereja Katolik sangat penting karena ia adalah orang yang pertama kali mengakui Yesus sebagai Tuhan dan menyatakan kesetiaannya kepadanya. Peran Petrus dalam Gereja Katolik sangat penting karena ia adalah orang yang pertama kali mengakui Yesus sebagai Tuhan dan menyatakan kesetiaannya kepadanya.

1.6. Petrus sebagai Kepala Gereja

Petrus diangkat sebagai kepala petrus karena ia adalah orang yang pertama kali mengakuinya sebagai Tuhan dan menyatakan kesetiaannya kepadanya. Peran Petrus dalam Gereja Katolik sangat penting karena ia adalah orang yang pertama kali mengakui Yesus sebagai Tuhan dan menyatakan kesetiaannya kepadanya. Peran Petrus dalam Gereja Katolik sangat penting karena ia adalah orang yang pertama kali mengakui Yesus sebagai Tuhan dan menyatakan kesetiaannya kepadanya.

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, format Perjanjian Kinerja terdiri atas dua bagian yaitu Formulir Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Formulir Perjanjian Kinerja mempedomani aturan tersebut, maka format perjanjian kinerja juga mempedomani hal tersebut :

1) Pernyataan Perjanjian Kinerja

Pernyataan Perjanjian Kinerja merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan instansi/unit kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu dalam hal ini Pemerintah Kota Padang Panjang untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan janji kesanggupan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (penerima amanah), kepada atasan langsung untuk Tahun 2019.

2) Lampiran Perjanjian Kinerja

Lampiran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang dan seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Padang Panjang yang memuat sasaran, indikator kinerja, target kinerja, Program dan kegiatan utama serta jumlah anggaran yang dialokasikan, yang akan diwujudkan baik oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maupun Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2019.

1.7 Sistematika Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Berikut ini sistematika penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, beberapa pengertian-pengertian yang berhubungan dengan Perjanjian Kinerja, tujuan, ruang lingkup, keterkaitan dengan sistem AKIP, format dan sistematika penyusunan Perjanjian Kinerja.

BAB II STRUKTURAL ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menjelaskan tentang Struktural Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang.

BAB III RENCANA STRATEGIK

Bab ini menguraikan tentang Visi, Misi dan Penetapan Tujuan, Sasaran dan Cara Pencapaiannya.

BAB IV Perjanjian Kinerja

Bab ini terdiri atas Perjanjian Kinerja dan Lampiran yang berisi Sasaran Strategik, Indikator Kinerja, Target Kinerja, Program/Kegiatan dan Jumlah Anggaran yang dialokasikan.

BAB V PENUTUP

Bagian terakhir ini memuat beberapa poin penting sebagai kesimpulan dan saran tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang.

BAB II BELAJAR STRATEGIS

Belajar merupakan suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus dan berlangsung sepanjang hayat. Belajar merupakan suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus dan berlangsung sepanjang hayat.

BAB III BELAJAR STRATEGIS

Belajar merupakan suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus dan berlangsung sepanjang hayat. Belajar merupakan suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus dan berlangsung sepanjang hayat.

BAB IV BELAJAR STRATEGIS

Belajar merupakan suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus dan berlangsung sepanjang hayat. Belajar merupakan suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus dan berlangsung sepanjang hayat.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

2.1 Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota dan bertanggungjawab kepada Walikota. Sekretariat Daerah Kota membantu Walikota penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

- 1) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuang kerja Perangkat daerah;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
- 4) Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kota merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota, Sekretariat DPRD Kota dipimpin oleh Sekretaris DPRD Kota yang dalam melaksanakan tugas secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD Kota dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh dengan Keputusan Walikota atas persetujuan pimpinan DPRD Kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi. Sekretariat DPRD Kota mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota, serta diperlukan oleh DPRD Kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya dengan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TENTANG

Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Penyelenggaraan Pemerintahan
Kabupaten Karangasem

1.1 Sekretariat Daerah

Sekretaris Daerah merupakan unsur vital yang memimpin dan mengkoordinasi
kegiatan Kantor dan para pembantuannya kepada Walikota. Sekretaris Daerah
Kota Karangasem memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan
pelayanan terhadap pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah serta pelaksanaan
kegiatan pemerintahan.

- 1) Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
- 2) Pelaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan;
- 3) Pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- 4) Pelayanan administrasi dan pembinaan dan pengawasan serta etika negara pada
kegiatan pemerintahan;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang dibagikan oleh Walikota Karangasem dengan
sesuai dan fungsinya.

1.2 Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kota Karangasem merupakan unsur pelayanan administratif dan
pembantuannya yang bertugas tugas dan fungsi DPRD Kota Karangasem
DPRD Kota Karangasem dan Sekretaris DPRD Kota Karangasem dalam melaksanakan
kegiatan-kegiatan operasional yang berkaitan dengan penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan DPRD Kota Karangasem administratif dan pembantuannya
kepada Walikota Karangasem melalui Sekretaris Daerah Sekretaris DPRD dan
dibantu oleh para pembantuannya dan Walikota Karangasem serta pembantuannya
DPRD Kota Karangasem dalam melaksanakan dan pembinaan tugas Sekretaris DPRD
Kota Karangasem tugas menyelenggarakan administratif ke sekretariat dan
kegiatan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Karangasem
dibantu oleh DPRD Kota Karangasem dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan

kebutuhan, Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Kota;
- 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Kota;
- 3) Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Kota; dan
- 4) Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kota.

2.3 Inspektorat

Inspektorat Kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dipimpin oleh Inspektur, Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah kota dalam melaksanakan tugas menyelenggaraan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kota; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.4 Dinas Daerah

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah Kota yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. Dinas Daerah Kota mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

keputusan. Sekretariat DPRD dapat melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan administrasi sekretariat DPRD Kota
- 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Kota
- 3) Penyelenggaraan urusan umum DPRD Kota
- 4) Penyelenggaraan pengkoordinasian tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD

2.3 Inspektur

Inspektur Kota merupakan suatu perangkat penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pejabat fungsional yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah, Inspektur Kabupaten/Kota sebagai Wakil Kepala Daerah, Inspektur Kabupaten/Kota sebagai pejabat dan pegawai seluler dan Pegawai Pemerintah yang mendampingi dan mengkoordinasikan tugas pemerintahan. Inspektur Kota adalah pejabat yang melaksanakan tugas penyelenggaraan fungsi sebagai berikut :

- 1) Melakukan urusan teknis bidang pengawasan dan teknis pengawasan
- 2) Melakukan pengawasan terhadap tingkat kinerja dan keuangan melalui audit keuangan, pelaksanaan dan kegiatan pengawasan lainnya
- 3) Melakukan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penggunaan kekayaan
- 4) Melakukan pengawasan terhadap pegawai
- 5) Melakukan administrasi legal-legal Kota
- 6) Melakukan urusan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan tanggung jawab

2.4 Dinas

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyangkut kepentingan Daerah. Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah yang bertanggung jawab dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. Dinas Daerah nota mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pemerintahan yang diberikan kepada Kota.

Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Dinas Daerah Kota Padang Panjang berdasarkan Perda Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, urusan pemerintah bidang Pemuda dan Olahraga serta urusan pemerintah bidang Kebudayaan.
- 2) Dinas Kesehatan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Kesehatan;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
- 4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kententeraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- 6) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 7) Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;

Dalam hal ini, dalam melaksanakan tugas mereka menggunakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perencanaan: merencanakan dan menetapkan tujuan, strategi, dan kebijakan;
- 2) Pengorganisasian: mengatur dan mengalokasikan sumber daya organisasi;
- 3) Pelaksanaan: melaksanakan rencana yang telah ditetapkan;
- 4) Pengawasan: memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi;
- 5) Penyesuaian: menyesuaikan organisasi dengan perubahan lingkungan.

Adapun dalam proses ini, fungsi-fungsi manajemen yang harus dilakukan oleh manajer adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan tujuan: Menetapkan tujuan yang jelas, terukur, dan dapat diukur;
- 2) Menentukan struktur organisasi: Menentukan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan;
- 3) Menetapkan kebijakan: Menetapkan kebijakan yang akan memandu organisasi;
- 4) Menetapkan prosedur: Menetapkan prosedur yang akan memandu pelaksanaan kegiatan.

Manajemen yang efektif adalah yang mampu mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif.

- 1) Menetapkan tujuan: Menetapkan tujuan yang jelas, terukur, dan dapat diukur;
- 2) Menentukan struktur organisasi: Menentukan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan;
- 3) Menetapkan kebijakan: Menetapkan kebijakan yang akan memandu organisasi;
- 4) Menetapkan prosedur: Menetapkan prosedur yang akan memandu pelaksanaan kegiatan.

Manajemen yang efektif adalah yang mampu mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif.

- 1) Menetapkan tujuan: Menetapkan tujuan yang jelas, terukur, dan dapat diukur;
- 2) Menentukan struktur organisasi: Menentukan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan;
- 3) Menetapkan kebijakan: Menetapkan kebijakan yang akan memandu organisasi;
- 4) Menetapkan prosedur: Menetapkan prosedur yang akan memandu pelaksanaan kegiatan.

Manajemen yang efektif adalah yang mampu mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif.

- 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 9) Dinas Komunikasi dan Dinas Informatika Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik, dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
- 10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
- 11) Dinas Pariwisata Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
- 12) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
- 13) Dinas Pangan dan Pertanian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, urusan pemerintahan bidang Pertanian, urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan; dan
- 14) Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian.

2.5 Badan Daerah Kota

Badan Daerah Kota merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah Kota. Badan Daerah Kota dipimpin oleh Kepala Badan Daerah Kota yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. Badan Daerah Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

- 1) Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

- 6) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sifat Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kebudayaan dan Pariwisata Sifat
- 7) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Perikanan
- 10) Dinas Perikanan Model dan Pelayanan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan Sifat dan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja
- 11) Dinas Perikanan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan
- 12) Dinas Perikanan dan Kelautan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan bidang Kelautan
- 13) Dinas Pangan dan Pertanian Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan urusan pemerintahan bidang Pertanian, urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan dan
- 14) Dinas Pertambangan, Kehutanan, Utsaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan, urusan pemerintahan bidang Kehutanan, Utsaha Kecil dan Menengah, dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian

2.3 Badan Eksekutif

Badan Eksekutif Kota merupakan salah satu unsur pemerintahan yang memiliki wewenang. Badan Eksekutif Kota dipimpin oleh Walikota. Badan Eksekutif yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. Badan Eksekutif Kota mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota

- 1) Penyelenggaraan kegiatan teknis sesuai dengan tugasnya
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan tugasnya
- 3) Pelaksanaan urusan dan koordinasi pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan tugasnya

- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Badan Daerah Kota Padang Panjang berdasarkan Perda Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 2) Badan Pengelola Keuangan Daerah Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan; dan
- 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

2.6 Kecamatan

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
- 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;

4) Perencanaan bentuk penyediaan sumber-sumber belajar; dan
5) Perencanaan bentuk sumber belajar yang digunakan.

Adapun bentuk-bentuk perencanaan yang dimaksudkan adalah:
1) Perencanaan bentuk penyediaan sumber-sumber belajar;
2) Perencanaan bentuk penyediaan sumber belajar yang digunakan;

3) Perencanaan bentuk penyediaan sumber belajar yang digunakan;
4) Perencanaan bentuk penyediaan sumber belajar yang digunakan;
5) Perencanaan bentuk penyediaan sumber belajar yang digunakan;

6) Perencanaan bentuk penyediaan sumber belajar yang digunakan;
7) Perencanaan bentuk penyediaan sumber belajar yang digunakan;
8) Perencanaan bentuk penyediaan sumber belajar yang digunakan;

9) Perencanaan bentuk penyediaan sumber belajar yang digunakan;
10) Perencanaan bentuk penyediaan sumber belajar yang digunakan;
11) Perencanaan bentuk penyediaan sumber belajar yang digunakan;

- 8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah Kota yang ada di Kecamatan; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan.

Adapun Kecamatan yang ada di lingkungan : Pemerintah Kota Padang Panjang berdasarkan Perda Kota Padang Panjang berdasarkan Perda Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Padang Panjang Timur Tipe B,
- 2) Kecamatan Padang Panjang Barat Tipe B.

Adapun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Walikota Padang Panjang sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah diatur dengan Perwako No. 29/2016
2. Sekretariat DPRD diatur dengan Perwako No. 30/2016
3. Inspektorat Daerah diatur dengan Perwako No. 31/2016
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga diatur dengan Perwako No. 32/2016
5. Dinas Kesehatan diatur dengan Perwako No. 33/2016
6. Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang diatur dengan Perwako No. 34/2016
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup diatur dengan Perwako No. 35/2016
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diatur dengan Perwako No. 36/2016
9. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diatur dengan Perwako No. 37/2016
10. Dinas Perhubungan diatur dengan Perwako No. 38/2016

11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur dengan Perwako No. 39/2016
12. Dinas Komunikasi dan Informatika diatur dengan Perwako No. 40/2016
13. Dinas Penanaman modal dan PTSP diatur dengan Perwako No. 41/2016
14. Dinas Pariwisata diatur dengan Perwako No. 43/2016
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diatur dengan Perwako No. 44/2016
16. Dinas Pangan dan Pertanian diatur dengan Perwako No. 44/2016
17. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diatur dengan Perwako No. 45/2016
18. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah diatur dengan Perwako No. 36/2016
19. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Perwako No. 47/2016
20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM diatur dengan Perwako No. 48/2016
21. Kecamatan Padang Panjang Barat diatur dengan Perwako No. 49/2016
22. Kecamatan Padang Panjang Timur diatur dengan Perwako No. 49/2016
23. BPBD dan Kesbangpol diatur dengan Perwako No. 49/2010
24. Rumah Sakit Umum Daerah diatur dengan Perwako No.41/2010

11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Perindustrian dan Perdagangan No. 40/2018
12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Perindustrian dan Perdagangan No. 40/2018
13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Perindustrian dan Perdagangan No. 40/2018
14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Perindustrian dan Perdagangan No. 40/2018
15. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Perindustrian dan Perdagangan No. 40/2018
16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Perindustrian dan Perdagangan No. 40/2018
17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Perindustrian dan Perdagangan No. 40/2018
18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Perindustrian dan Perdagangan No. 40/2018
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Perindustrian dan Perdagangan No. 40/2018
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Perindustrian dan Perdagangan No. 40/2018
21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Perindustrian dan Perdagangan No. 40/2018
22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Perindustrian dan Perdagangan No. 40/2018
23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Perindustrian dan Perdagangan No. 40/2018
24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Perindustrian dan Perdagangan No. 40/2018

BAB III

RENCANA STRATEGIK

Rencana strategik merupakan alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini, untuk melakukan proyeksi kondisi masa datang dengan memanfaatkan segenap potensi sumber daya yang ada. Untuk instansi pemerintah, rencana strategik tersebut memuat antara lain visi, misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program serta ukuran capaian dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, Perencanaan strategik tersebut secara umum mengandung makna suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun sampai 10 (sepuluh) tahun ke depan, yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, potensi, peluang dan tantangan yang ada atau yang mungkin timbul.

Sebagai organisasi publik, Pemerintah Kota Padang Panjang perlu menyusun dan menetapkan rencana strategik. Ini menjadi penting karena dengan adanya Rencana Strategik tersebut, akan dapat diketahui sejauh mana kinerja yang telah berhasil dicapai dan apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Rencana strategik tersebut adalah berupa RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 serta Renstra SKPD. Beberapa variabel rencana strategik yang dikemukakan dalam Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2019 ini mengacu kepada RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023. Variabel strategik tersebut antara lain sebagai berikut:

3.1 Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan tentang apa yang akan dicapai oleh suatu organisasi atau lembaga. Adapun rumusan visi Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut **"UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT"**.

Dari Visi Kota Padang Panjang yang telah disepakati tersebut, ada beberapa hal pokok dan makna yang perlu dipahami yaitu antara lain:

REVISI STRATEGI

Penyusunan strategi merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengelola organisasi ke arah pencapaian tujuan. Strategi adalah rencana yang menyeluruh dan jangka panjang yang menentukan arah organisasi dan bagaimana organisasi akan mencapai tujuannya. Strategi yang baik adalah yang yang dapat memberikan keunggulan kompetitif dan berkelanjutan bagi organisasi. Strategi yang baik adalah yang yang dapat memberikan keunggulan kompetitif dan berkelanjutan bagi organisasi.

Salah satu tantangan utama Pemerintahan Kota Padang Panjang saat ini adalah meningkatkan pendapatan daerah. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan strategi yang komprehensif dan inovatif. Rencana Strategis Kota Padang Panjang 2018-2022 menekankan pada peningkatan pendapatan daerah melalui diversifikasi sumber pendapatan, peningkatan efisiensi anggaran, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Strategi ini akan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan yang terdapat dalam Rencana Strategis Kota Padang Panjang 2018-2022.

2.1. Visi

Visi adalah gambaran yang menggambarkan keadaan yang diharapkan di masa depan. Visi Kota Padang Panjang adalah "Padang Panjang yang maju, sejahtera, dan berkeadilan". Untuk mencapai visi ini, diperlukan strategi yang komprehensif dan inovatif. Rencana Strategis Kota Padang Panjang 2018-2022 menekankan pada peningkatan pendapatan daerah melalui diversifikasi sumber pendapatan, peningkatan efisiensi anggaran, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Strategi ini akan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan yang terdapat dalam Rencana Strategis Kota Padang Panjang 2018-2022.

3.2 Misi

Misi pada dasarnya merupakan upaya yang ditetapkan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian visi yang dikemukakan diatas, serta untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, ditetapkan beberapa misi utama yang akan dilaksanakan dalam periode 5 tahun mendatang. Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan daerah berbasis pembangunan berkelanjutan
2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas daya saing SDM masyarakat yang berakhlak dan berbudaya
3. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang responsif inovatif dan partisipatif

3.3 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu. Tujuan dapat juga dikatakan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Memahami hal tersebut dan sesuai dengan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 beberapa tujuan yang hendak diwujudkan adalah:

Misi Pertama Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan bertujuan untuk:

- 1) Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan
- 2) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

Misi Kedua Meningkatnya pemerataan kualitas daya saing SDM masyarakat yang berakhlak dan berbudaya bertujuan untuk:

- 1) Meningkatnya pemerataan dan kualitas daya saing SDM yang sehat, berakhlak dan unggul
- 2) Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis

Misi Ketiga Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang responsif, inovatif dan partisipatif bertujuan untuk:

- 1) Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih
- 2) Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

3.4 Sasaran

Sasaran mengandung makna sebagai penjabaran dari tujuan, merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Berikut ini digambarkan sasaran Kota Padang Panjang tersebut dan kaitannya dengan Misi dan Tujuan seperti dilihat pada tabel berikut ini :

Misi	Tujuan	Sasaran
Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan	Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan 2. Meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya ketimpangan kesejahteraan masyarakat 2. Menurunnya angka kemiskinan 3. Menurunnya tingkat pengangguran 4. Meningkatnya pendapatan masyarakat
Meningkatnya pemerataan kualitas daya saing SDM masyarakat yang berakhlak dan berbudaya	Meningkatnya pemerataan dan kualitas daya saing SDM yang sehat, berakhlak dan unggul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemerataan kualitas daya saing pendidikan 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya masalah kesejahteraan sosial 2. Meningkatnya aktivitas keagamaan di masyarakat

Misalnya, meningkatkan tata kelola perusahaan yang transparan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan tanggung jawab pemerintah yang lebih baik dan bersih.

2) Meningkatkan transparansi pemerintah yang lebih baik dan bersih.

3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan bersih.

3.4.3.4.3.4.3.4

Salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan bersih. Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan bersih. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan bersih.

Indikator	Tujuan	Uraian
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan bersih.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan bersih.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan bersih.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan bersih.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan bersih.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan bersih.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan bersih.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan bersih.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan bersih.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan bersih.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan bersih.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan bersih.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan bersih.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan bersih.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan bersih.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan bersih.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan bersih.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan bersih.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan bersih.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan bersih.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan bersih.
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan bersih.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan bersih.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan bersih.
9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan bersih.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan bersih.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan bersih.
10. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan bersih.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan bersih.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan bersih.

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang responsif, inovatif dan partisipatif	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah 2. Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan melayani
	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya peran serta kelompok lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan 2. Meningkatnya pemberdayaan perempuan

BAB IV

PERJANJIAN KINERJA

Secara konseptual Perjanjian Kinerja dapat dipandang sebagai suatu kontrak kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasannya yang menggambarkan capaian kinerja yang akan diujulkannya. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2019 merupakan dokumen pernyataan Perjanjian Kinerja Walikota Padang Panjang dan antara Walikota Padang Panjang sebagai atasan dengan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dengan alokasi anggarannya telah disediakan dalam APBD Pemerintahan Kota Padang Panjang Tahun 2019.

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat daerah Lingkup Pemerintah Kota Padang Panjang akan dijadikan acuan dalam mengukur pencapaian kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah baik tingkat OPD maupun tingkat Pemerintah kota.

Sekaitan dengan itu, dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang yang terdiri dari Pernyataan Perjanjian Kinerja Kota dan Pernyataan Perjanjian Kinerja OPD berikut dengan Lampiran Perjanjian Kinerja yang terdiri dari :

- A. Pernyataan Perjanjian Kinerja Kota Dan Perjanjian Kinerja OPD
- B. Perjanjian Kinerja OPD
 - 1. Sekretariat Daerah
 - 2. Sekretariat DPRD
 - 3. Inspektorat Daerah
 - 4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
 - 5. Dinas Kesehatan
 - 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 7. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup

Secara keseluruhan Perjanjian Kinerja dapat dipandang sebagai suatu kontrak kinerja yang telah diratifikasi oleh seorang pejabat pemerintah daerah kepada atasan yang menunjukkan capaian kinerja yang akan diwujudkan. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2019 merupakan dokumen perjanjian kinerja Walikota Padang Panjang dan antara lain merupakan perjanjian sebagai dasar dengan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Lembaga Pemerintah Kota Padang Panjang untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dengan alokasi anggarannya telah disediakan dalam APBD Pemerintahan Kota Padang Panjang Tahun 2019.

Dalam perjanjian kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Pemerintah Kota Padang Panjang akan dijadikan acuan dalam mengukur pencapaian kinerja dalam Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah baik tingkat OPD maupun tingkat Pemerintah Kota.

Sekitar tahun itu dengan telah diteruskannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Panjang tahun 2015 maka disusulkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang yang terdiri dari Perencanaan Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Perjanjian Kinerja OPD berikut dengan Lampiran Perjanjian Kinerja yang terdiri dari:

- A. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kota Dan Perjanjian Kinerja OPD
- B. Perjanjian Kinerja OPD
 - 1. Sekretariat Daerah
 - 2. Sekretariat DPRD
 - 3. Sekretariat Daerah
 - 4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
 - 5. Dinas Kesehatan
 - 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - 7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

8. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Dinas Komunikasi dan Informatika
12. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
13. Dinas Pariwisata
14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
15. Dinas Pangan dan Pertanian
16. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
17. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
18. Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
19. Badan Pengelola Keuangan Daerah
20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
21. BPBD dan Kesbangpol
22. Kecamatan Padang Panjang Barat
23. Kecamatan Padang Panjang Timur
24. RSUD

Selanjutnya dimuat dalam Lampiran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang tahun 2019 ini

8. Tesis Sosial, Pendidikan Pendidikan, F. B. Pembudayaan Persepsi dan Perilaku dan Akar...
9. Dina Perbandingan
10. Dina Keras, Struktur dan Perawatan Sisi
11. Dina Komunikasi dan Informatika
12. Dina Perencanaan, Sosial dan PISA
13. Dina Persepsi
14. Dina Perputaran dan Keaktifan
15. Dina Peranan dan Perilaku
16. Dina Perancangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
17. Dina Peran Perang Pajsa dan Peradaban Kebakaran
18. Badan Penelitian dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
19. Badan Pengolah Keuangan Daerah
20. Badan Keselamatan dan Pengembangan SDM
21. BPTD dan Keselamatan
22. Kerasatan, Perang Panjang Sosial
23. Keselamatan Perang Panjang Sosial
24. RASUN

Selanjutnya dimuat dalam Lampiran Penelitian Kinerja Pemadatan Kota Padang Panjang tahun 2019 ini



WALIKOTA PADANG PANJANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FADLY AMRAN, BBA
Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Padang Panjang, 11 Maret 2019
WALIKOTA PADANG PANJANG



FADLY AMRAN, BBA



WALIKOTA PADANG PANJANG

PERALIHAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta profesionalitas dan integritas yang tinggi, yang berpedoman pada nilai-nilai sebagai berikut:

WALIKOTA PADANG PANJANG
RADLY AMRAN BBA

Kepada seluruh pegawai negeri sipil yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran, yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran, yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran, yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran.

Padang Panjang, 11 Maret 2019
WALIKOTA PADANG PANJANG

RADLY AMRAN BBA

**PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	OPD PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA	
VISI : UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT					
I MISI I					
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan*					
T1.	Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.96	BPS, Lintas Perangkat Daerah	
	S1. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Unggulan Daerah Yang Tangguh dan Berbasis Ekonomi Kerakyatan	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.05	BPS, Dinas Pangan Pertanian	
		2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	5.02	BPS, Disdagkop UMKM	
		3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri	2.28	BPS, Disdagkop UMKM	
		4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.61	BPS, Lintas Perangkat Daerah	
	S2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	5. Jumlah Kunjungan Wisata	600.000 orang	Dinas Pariwisata	
		6. Persentase Kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	0.50	Dinas PUPR	
		7. IKLH	65.25-66.57	Dinas Perkim LH	
	T2.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	2. PDRB Perkapita	48.19	BPS
	S3. Menurunnya Angka Kemiskinan	8. Angka Kemiskinan	5.45	BPS	
	S4. Menurunnya Angka Pengangguran	9. Indeks Gini	0.28	BPS	
S5. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	10. Tingkat Pengangguran Terbuka	4.84	BPS, Lintas Perangkat Daerah		
	11. Pengeluaran Perkapita (Daya Beli Masyarakat)	10.29	BPS		
II MISI 2					
Meningkatkan Pemerataan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat Yang Berakhlak dan Berbudaya					
T3.	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM yang sehat, berakhlak dan unggul	3. Indeks Pembangunan Manusia	78.25	BPS, Lintas Perangkat Daerah	
	S6. Meningkatkan Pemerataan Kualitas Daya Saing Pendidikan	12. Rata-rata Lama Sekolah 13. Harapan Lama Sekolah	11.88 15.27	BPS, Dinas Pendidikan BPS, Dinas Pendidikan	
	S7. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	14. Angka Harapan Hidup	72.47	BPS, Dinas Kesehatan	
T4.	Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	4. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Keterliban Umum	96.37	Lintas Perangkat Daerah	
	S8. Meningkatkan Ketenteraman dan Keterliban Umum	15. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Keterliban Umum	96.37	Lintas Perangkat Daerah	
NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	OPD PENANGGUNG JAWAB/ SUMBER DATA	
	S9. Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	16. Persentase Penurunan Jumlah PMKS	2.34	Dinas Sosial	
	S10. Meningkatnya Aktivitas Keagamaan di Masyarakat	17. Persentase aktivitas kegiatan keagamaan di mesjid	38.82	Bag. Kesra	

PERJANJIAN KERJASAMA
PENERBITAN DI LAPANGAN RAJAJAYA
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Uraian Pekerjaan	Kategori Harga	Unit	Kuantitas
Kategori Pekerjaan: Pekerjaan Konstruksi				
Kategori Pekerjaan: Pekerjaan Sipil				
Kategori Pekerjaan: Pekerjaan Listrik				
Kategori Pekerjaan: Pekerjaan Kimia				
Kategori Pekerjaan: Pekerjaan Kayu				
Kategori Pekerjaan: Pekerjaan Baja				
Kategori Pekerjaan: Pekerjaan Perbaikan				
Kategori Pekerjaan: Pekerjaan Perawatan				
Kategori Pekerjaan: Pekerjaan Lain-lain				
Kategori Pekerjaan: Pekerjaan Lainnya				
Kategori Pekerjaan: Pekerjaan Perbaikan				
Kategori Pekerjaan: Pekerjaan Perawatan				
Kategori Pekerjaan: Pekerjaan Lain-lain				
Kategori Pekerjaan: Pekerjaan Lainnya				
Kategori Pekerjaan: Pekerjaan Perbaikan				
Kategori Pekerjaan: Pekerjaan Perawatan				
Kategori Pekerjaan: Pekerjaan Lain-lain				
Kategori Pekerjaan: Pekerjaan Lainnya				
Kategori Pekerjaan: Pekerjaan Perbaikan				
Kategori Pekerjaan: Pekerjaan Perawatan				
Kategori Pekerjaan: Pekerjaan Lain-lain				
Kategori Pekerjaan: Pekerjaan Lainnya				
Kategori Pekerjaan: Pekerjaan Perbaikan				
Kategori Pekerjaan: Pekerjaan Perawatan				
Kategori Pekerjaan: Pekerjaan Lain-lain				
Kategori Pekerjaan: Pekerjaan Lainnya				
Kategori Pekerjaan: Pekerjaan Perbaikan				
Kategori Pekerjaan: Pekerjaan Perawatan				
Kategori Pekerjaan: Pekerjaan Lain-lain				
Kategori Pekerjaan: Pekerjaan Lainnya				

III. MISI 3					
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif					
T5.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih		5. Indeks Reformasi Birokrasi	62	Inspektorat Daerah
	S11. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	18. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		B (65)	Lintas Perangkat Daerah
	S12. Terselenggaranya Pelayanan Publik	19. Indeks Kepuasan Masyarakat		78 (Baik)	Lintas Perangkat Daerah
T6.	Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan		6. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	70	Lintas Perangkat Daerah
	S13. Meningkatnya Peran Serta Kelompok /Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan	20. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif		70	Lintas Perangkat Daerah
	S14. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	21. Indeks Pemberdayaan Gender		77.50	Dinas Sosial PPKBPPPA

No.	Sasaran/Program	Anggaran	Ket
1.	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Unggulan Daerah yang Tangguh Berbasis Ekonomi Kerakyatan	13.316.226.100,00	
1.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	197.545.000	Disdagkop UMKM
2.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.343.544.000	Disdagkop UMKM
3.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah	467.000.000	Disdagkop UMKM
4.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	734.340.000	Disdagkop UMKM
5.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	2.664.316.000	Dinas Pariwisata
6.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2.385.225.000	Dinas Pariwisata
7.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	882.304.800	Dinas Pangan Pertanian
8.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1.783.728.000	Dinas Pangan Pertanian
9.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	590.609.000	Dinas Pangan Pertanian
10.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.973.464.300	Dinas Pangan Pertanian
11.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	294.150.000	Dinas PMPTSP
2.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	46.272.883.000,00	
1.	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik	11.811.680.000	Dinas PUPR
2.	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Trotoar	3.729.975.000	Dinas PUPR
3.	Program Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	10.119.550.000	Dinas PUPR
4.	Program Penerangan Jalan Umum	2.373.749.600	Dinas PUPR
5.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	1.239.774.700	Dinas Perhubungan
6.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	4.490.007.550	Dinas PUPR
7.	Program Perencanaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	728.098.800	Dinas PUPR
8.	Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	1.756.381.000	BPBD Kesbangpol
9.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	7.836.171.350	Dinas Perkim LH
10.	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	1.076.520.000	Dinas Perkim LH
11.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.110.975.000	Dinas Perkim LH
3.	Menurunnya Angka Kemiskinan	18.240.579.800,00	
1.	Program Kewirausahaan Bagi Masyarakat Miskin	1.469.950.000	Disdagkop UMKM
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Pertanian	457.395.300	Dinas Pangan Pertanian
3.	Program Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Permukiman	892.750.000	Dinas Perkim LH
4.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	15.420.484.500	Dinas Kesehatan

4.	Menurunnya Angka Pengangguran	133.467.500	
	1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	133.467.500	DPMTSP
5.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	629.344.800	
	1. Program Pengembangan Rumah Wirausaha	554.345.000	Disdagkop UMKM
	2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	74.999.800	Dinas Pangan Pertanian
6.	Meningkatnya Pemerataan Kualitas Daya Saing Pendidikan	32.496.753.500	
	1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Masyarakat	2.493.971.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	2. Program Padang Panjang Juara	855.800.000	Disdikpora
	3. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2.062.488.500	Disdikpora
	4. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	21.219.658.000	Disdikpora
	5. Program Pendidikan Anak Usia Dini	4.698.175.000	Disdikpora
	6. Program Pendidikan Non Formal	1.166.661.000	Disdikpora
7.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	100.698.322.000	
	1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	15.420.484.500	Dinas Kesehatan
	2. Program Pembekalan Gizi Masyarakat	198.074.000	Dinas Kesehatan
	3. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	729.200.000	Dinas Kesehatan
	4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	303.523.000	Dinas Kesehatan
	5. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	1.474.420.000	Disdikpora
	6. Program Layanan Kesehatan Rumah Sakit	65.495.950.000	RSUD
	7. Program Pelayanan Kesehatan	978.833.500	Dinas Kesehatan
	8. Program Pengendalian Penduduk dan KB	2.601.887.000	Dinas Sosial PPKBPPPA
	9. Program Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit	13.495.950.000	RSUD
8	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.558.679.000	
	1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	4.558.679.000	Satpol PP
9.	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1.605.048.500	
	1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	608.583.500	Dinas Sosial PPKBPPPA
	2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	996.465.000	Dinas Sosial PPKBPPPA
10.	Meningkatnya Aktivitas Keagamaan di Masyarakat	10.550.945.000	
	1. Program Koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Budaya dan Keagamaan	9.360.475.000	Bagian Kesra
	2. Program Pemajuan Kebudayaan	1.190.470.000	Disdikpora
11.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	16.940.217.275	
	1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	973.411.700	Bappelitbang
	2. Program Penelitian dan Pengembangan	1.515.900.000	Bappelitbang
	3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	965.260.000	Inspektorat Kota
	4. Program Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah	243.346.250	Bag. Organisasi
	6. Program Peningkatan dan Pengelolaan Penganggaran Daerah	1.503.190.000	BPKD
	7. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	273.568.000	BPKD
	8. Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah	422.897.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	9. Program Peningkatan Akses Kualitas Informasi Publik	2.388.755.325	Dinas Kominfo
	10. Program e-Government	7.990.214.000	Dinas Kominfo
	11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	663.675.000	BKPSDM
12.	Terselenggaranya Pelayanan Publik	1.728.238.500	
	1. Program Administrasi Kependudukan	1.059.569.000	Dinas Duk Capil
	2. Program Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	438.730.000	Bag. Organisasi
	3. Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu	38.939.500	DPMTSP
	4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	191.000.000	Dinas Duk Capil
13.	Meningkatnya Peran Serta Kelompok /Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan	11.407.265.500,00	
	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	7.763.121.500	Kecamatan
	2. Program Peningkatan Kelembagaan Masyarakat	2.186.607.000	Dinas Sosial PPKBPPPA
	3. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1.116.012.000	Disdikpora
	4. Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	341.525.000	Dinas Sosial PPKBPPPA

14	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	343.904.000,00	
	1 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	343.904.000	Dinas Sosial PPKBPPA

Padang Panjang, 11 Maret 2019
WALIKOTA PADANG PANJANG


FADLY AMRAN, BBA

BAB V

PENUTUP

Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2019, merupakan tekad dan janji Pemerintah Kota Padang Panjang sekaligus tekad dan janji kepala OPD untuk pencapaian rencana kinerja tahunan dalam rangka memenuhi amanat perundang-undangan. Perjanjian Kinerja ini adalah bagian dari upaya nyata untuk memerangi korupsi dengan melakukan perubahan mendasar terhadap manajemen pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2014 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dalam Perjanjian Kinerja ini dilakukan penyesuaian-penyesuaian baik dari aspek dokumen perencanaan yakni RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 maupun dari program dan kegiatan pada OPD sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019.

Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2019 diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang berbagai rencana capaian kinerja dari seluruh OPD yang ada. Selain itu, juga bagian dari transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) maupun pemerintahan yang bersih (Clean Governance)

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2019 ini, berarti Pemerintah Kota Padang Panjang telah dapat memenuhi salah satu kewajiban akuntabilitas yang merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sutan Syahrir No. 178 Padang Panjang
Telp: (0752) 82200 – Faks : (0752) 82870
Email: kominfo.pdgpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARTONI, S. Sos, M. Si
Jabatan : Pj. SEKRETARIS DAERAH

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA
Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 11 Maret 2019
PIHAK PERTAMA
Pj. SEKRETARIS DAERAH

MARTONI, S. Sos, M. Si
NIP. 197303041993081001

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SEKRETARIAT DAERAH



Jl. Sultan Syarifudin No. 177 Padang Panjang
Telp (0752) 83200 - Faks (0752) 83870
Email: sekretariat@padangpanjang.go.id

PERJALANAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka evaluasi dan penilaian pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
bertanggung jawab yang berlandaskan pada nilai-nilai yang dipegang di bawah ini

Nama : MARTON, S. Soe, M. Si
Jabatan : PI SEKRETARIAT DAERAH

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RADI AMRAN, SBA
Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku eselon - PIHAK PERTAMA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan melakukan target kinerja yang selanjutnya disebut sebagai
pekerjaan ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam Rencana Strategis Kabupaten Kepulauan Mentawai dan kegiatan tahunan yang tercantum
dalam anggaran pendapatan dan belanja.

PIHAK KEDUA akan melakukan evaluasi yang terdapat dalam rencana yang diuraikan dalam
pekerjaan ini dan melaporkan hasil evaluasi ini dan melaporkan tindakan yang diuraikan dalam rangka
pencapaian - pencapaian dan hasil.

Padang Panjang, 17 Mei 2019
PIHAK PERTAMA
PI SEKRETARIAT DAERAH

MARTON, S. Soe, M. Si
NIP. 19130304190301001

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

RADI AMRAN, SBA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Baik
2	Meningkatnya aktivitas keagamaan di masyarakat	% Lembaga Keagamaan, sosial dan budaya yang dibinda	38,82
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kebijakan sektor perekonomian	% Terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian Kota Padang Panjang	70
4	Meningkatnya pencapaian pembangunan daerah	% Pencapaian Kegiatan Pembangunan	70
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	- Nilai SAKIP	B (65)
		- Standar Pelayanan Minimal	84,67
6	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	78 (Baik)

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	3.565.435.000
2.	Kerjasama Informasi dengan Media Massa	302.080.000
3.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	720.890.000
4.	Penataan Kelembagaan dan Penataan Ketatalaksanaan	113.075.000
5.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	438.730.000
6.	Peningkatan Koordinasi Perekonomian Daerah	195.000.000
7.	Penataan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	453.430.000
8.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	243.346.250
9.	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	9.360.475.000

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 11 Maret 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**



**MARTON, S. Sos, M. Si
NIP.19730304 199308 1 001**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPANTARAIAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

NO	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	75 (Berdasarkan Standar Nasional)
2	2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	2. Jumlah Pengaduan Masyarakat	100 (Berdasarkan Standar Nasional)
3	3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	3. Jumlah Pengaduan Masyarakat	100 (Berdasarkan Standar Nasional)
4	4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	4. Jumlah Pengaduan Masyarakat	100 (Berdasarkan Standar Nasional)
5	5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	5. Jumlah Pengaduan Masyarakat	100 (Berdasarkan Standar Nasional)
6	6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	6. Jumlah Pengaduan Masyarakat	100 (Berdasarkan Standar Nasional)
7	7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	7. Jumlah Pengaduan Masyarakat	100 (Berdasarkan Standar Nasional)
8	8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	8. Jumlah Pengaduan Masyarakat	100 (Berdasarkan Standar Nasional)
9	9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	9. Jumlah Pengaduan Masyarakat	100 (Berdasarkan Standar Nasional)

ANGGARAN
3.888.438.000
302.000.000
1.700.000.000
1.180.000.000
438.730.000
100.000.000
487.438.000
243.248.280
1.240.429.000

PROGRAM
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Padang Panjang, 11 Maret 2019
PJ. KEPANTARAIAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

MARTON, S. S. M. S.
NIP. 19730711900084001

WALIKOTA PADANG PANJANG

R. SYARIF



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH**

JL. H. Agus Salim No. 07 RT VI Telp. (0752) 82081 Faks. (0752) 485775
Email: polpppadangpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZULKIFLI, SH
Jabatan : SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA
Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 11 Maret 2019
PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH


ZULKIFLI, SH
NIP. 19630422 198903 1010

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH



Jl. H. Agus Salim No. 01 RT VI Telok (0752) 82281 Faks. (0752) 488778
E-mail: pkr@padangpanjang.go.id - Website: www.padangpanjangkota.go.id

PERJALANAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka meningkatkan inspeksi pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil yang berwujud (angka di bawah ini)

Nama: SUKRELI, SH
Jabatan: SEKRETARIAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama: RADY AFRAN, BSA
Jabatan: WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku ini PIHAK PERTAMA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA bertujuan untuk menilai kinerja yang sebenarnya sebagai pimpinan
pemerintahan di tingkat kota yang akan diukur berdasarkan indikator yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keterhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
akan menjadi acuan dalam menentukan kebijakan yang akan dilaksanakan di tahun
selanjutnya. Untuk itu, PIHAK KEDUA akan memberikan dukungan yang diperlukan untuk
menyempatkan capaian kinerja dan perbaikan yang diperlukan dalam rangka
pembinaan kinerja dan peningkatan

Padang Panjang, 11 Maret 2019
PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

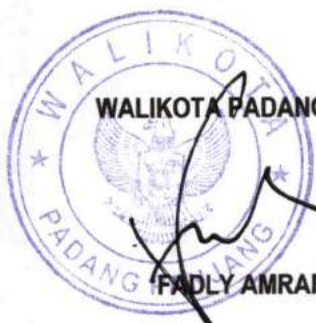
SUKRELI, SH
NIP. 19530422 198004 1010

RADY AFRAN, BSA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Fasilitas Penetapan Keputusan DPRD dan Berita Acara/Nota Kesepakatan/ Persetujuan Bersama Antara DPRD Dan Pemerintah Daerah dan PERDA Usulan Eksekutif (PEMKO) Serta Penyerapan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitas Penetapan Keputusan DPRD dan Berita Acara/Nota Kesepakatan/Persetujuan Bersama Antara DPRD dan Pemerintah	70%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan kelembagaan DPRD	19.123.280.000
2.	Legalisasi Peraturan Perundang-undangan	563.050.000
3.	Kerjasama Informasi dengan Media Massa	430.600.000


WALIKOTA PADANG PANJANG
 FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 11 Maret 2019
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG


 ZULKIFLI, SH
 NIP. 19630422 198903 1 010

PERJALAN KINERJA TAHUN 2019
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Publik Kualitas Pelayanan Masyarakat Kualitas Pelayanan Masyarakat Kualitas Pelayanan Masyarakat Kualitas Pelayanan Masyarakat	70%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	19.287.000
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	500.000.000
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	430.800.000

Padang Panjang, 11 Maret 2019
 SEKRETARIAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA PADANG PANJANG

Wakil Walikota Padang Panjang

 RIZKY AMAN, S.S.

Wakil Ketua DPRD Padang Panjang

 HRP. 0202022.198802.1.010



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Sutan Syahrir No.324 Telp. (0752) 84506 padang panjang 27118

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERVIC RINALDY, SH

Jabatan : Inspektur Daerah Kota Padang Panjang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : Walikota Padang Panjang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 2 Januari 2019

Pihak Pertama
**INSPEKTUR DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**

Pihak Kedua
WALIKOTA PADANG PANJANG



FADLY AMRAN, BBA


ERVIC RINALDY, SH
NIP. 19640815 199003 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTORAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP oleh Inspektorat minimal B dan CC	30%
2	Meningkatnya Penerapan Zona Integritas	- Persentase OPD yang mendapatkan predikat WBBM dan WBK	4%

NO

PROGRAM

ANGGARAN

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

970.260.000



Padang Panjang, 11 Maret 2019

INSPEKTUR
KOTA PADANG PANJANG


ERVIC RINALDY, SH
NIP. 19640815 199003 1 009

PELAKSIAN KINERJA TAHUN 2019
WILAYAH DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

NO	ASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1		3	
7	Memiliki nilai tambah yang signifikan	Persentase OPD yang memiliki nilai tambah yang signifikan Evaluasi EAKH oleh Inspektori Masyarakat dan OPD	100%
8	Memiliki nilai tambah yang signifikan	Persentase OPD yang mendapatkan Prestasi/RAKIP dan WDA	100%

ANGGARAN
Rp 50.000

NO. PROGRAM
1. Program Kerja Kota Tak Terpisahkan antara Pemerintahan Kecamatan
Kecamatan 11

Padang Panjang, 11 Maret 2019
INSPEKTUR
KOTA PADANG PANJANG

ERVIC RINALDY, SH
NIP. 19840821990031000

WILAYAH DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

RULLY RULLY BBA



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

JL. BUNDO KANDUANG NO. 1 TELP. (0752) 82156, FAX. (0752) 82128
PADANG PANJANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. DESMON, M.Pd

Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


**PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG**
FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 11 Maret 2019
**PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA**

Dr. DESMON, M.Pd
NIP. 19681020 199003 1 004

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. BUNDO KANDANG NO. 1 TELP. (0752) 82186 FAX (0752) 82123
PADANG PANJANG



PERJUALAN KINERJA TAHUN 2019

Untuk rangka kemajuan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
pencapaian pada hasil yang berbeda-beda di bawah ini:

Nama: DR. DESMON, M.Pd
Jabatan: KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama: FADLY AMRAN, BBA
Jabatan: WALI KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA berjanji akan menyukseskan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab kami
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap cara dan kinerja dan perjanjian ini dan mengumpulkannya yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 11 Maret 2019
PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAHRAGA

DR. DESMON, M.Pd
NIP. 19631020 19903 1 004

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkat dan meratanya kualitas pendidikan dengan SDM yang unggul, berdaya saing dan berkarakter islami	- Angka Kelulusan (AL) SD	100%
		- Angka Kelulusan (AL) SMP	100%
		- Peringkat UN SMP di Sumatera barat	4 dari 19 Kab/Kota
		- Rata-Rata Nilai UN SD	77
		- Rata-Rata Nilai UN SMP	57
2	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman budaya daerah yang diwujudkan dalam karakter dan pelestarian budaya	Pelaku budaya berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan minimal 4500 orang (7,5% dari total Penduduk Padang Panjang)	2500 orang
3	Terfasilitasinya pembinaan olahraga berkesinambungan dan kompetisi olahraga yang terstruktur serta berkelanjutan	Prestasi Olahraga	6 Prestasi Tingkat Provinsi
4	Terfasilitasinya pembinaan pemuda berkarakter kuat dan bertaqwa	Pemuda Berprestasi	3 Prestasi Tingkat Provinsi

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.015.000.000,00
2.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	4.698.175.000,00
3.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	21.219.658.000,00
4.	Program Pendidikan Non Formal	1.166.661.000,00
5.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.908.676.250,00
6.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2.062.488.500,00
7.	Program BOS	7.480.000.000,00
8.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1.116.012.000,00
9.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	1.474.420.000,00
10.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	1.155.000.000,00
11.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.190.470.000.000



**Padang Panjang, 11 Maret 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KOTA PADANG PANJANG**

**Dr. DESMON, M. Pd
NIP. 19681020 199003 1 004**

REKAPITULASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEMAHENDIKAN
KOTA PADANG BARU 2019

NO	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menyusun dan melaksanakan program kerja yang terencana, terukur, dan berkesinambungan	<ul style="list-style-type: none"> Target Kinerja (KPI) Target Kinerja (KPI) Target Kinerja (KPI) Target Kinerja (KPI) Target Kinerja (KPI) Target Kinerja (KPI) Target Kinerja (KPI) Target Kinerja (KPI) Target Kinerja (KPI) Target Kinerja (KPI) 	100%
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Target Kinerja (KPI) Target Kinerja (KPI) Target Kinerja (KPI) Target Kinerja (KPI) Target Kinerja (KPI) Target Kinerja (KPI) Target Kinerja (KPI) Target Kinerja (KPI) Target Kinerja (KPI) Target Kinerja (KPI) 	100%
3	Meningkatkan kinerja dan produktivitas	<ul style="list-style-type: none"> Target Kinerja (KPI) Target Kinerja (KPI) Target Kinerja (KPI) Target Kinerja (KPI) Target Kinerja (KPI) Target Kinerja (KPI) Target Kinerja (KPI) Target Kinerja (KPI) Target Kinerja (KPI) Target Kinerja (KPI) 	100%
4	Meningkatkan mutu dan kualitas	<ul style="list-style-type: none"> Target Kinerja (KPI) Target Kinerja (KPI) Target Kinerja (KPI) Target Kinerja (KPI) Target Kinerja (KPI) Target Kinerja (KPI) Target Kinerja (KPI) Target Kinerja (KPI) Target Kinerja (KPI) Target Kinerja (KPI) 	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas	1.100.000.000,00
2	Program Peningkatan Mutu dan Kualitas	1.100.000.000,00
3	Program Peningkatan Kinerja dan Produktivitas	1.100.000.000,00
4	Program Peningkatan Mutu dan Kualitas	1.100.000.000,00
5	Program Peningkatan Kinerja dan Produktivitas	1.100.000.000,00
6	Program Peningkatan Mutu dan Kualitas	1.100.000.000,00
7	Program Peningkatan Kinerja dan Produktivitas	1.100.000.000,00
8	Program Peningkatan Mutu dan Kualitas	1.100.000.000,00
9	Program Peningkatan Kinerja dan Produktivitas	1.100.000.000,00
10	Program Peningkatan Mutu dan Kualitas	1.100.000.000,00
11	Program Peningkatan Kinerja dan Produktivitas	1.100.000.000,00

DINAS PENDIDIKAN DAN KEMAHENDIKAN
KOTA PADANG BARU
11 Maret 2019

KOTA PADANG BARU

Drs. H. H. H. H.
NIP. 19630301 198003 1 004

Drs. H. H. H. H.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS KESEHATAN

Jln.K.H.Ahmad Dahlan No.05Padang Panjang 27128☎ (0752) 83146
Fax (0752) 83146 Email : dinkes.kotapadangpanjang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs.Nuryanuwar,Apt.MM,M.Kes

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akanmewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 11 Maret 2019
PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KESEHATAN

Drs.NURYANUWAR,Apt.MM,M.Kes
Nip. 19620123 199101 1 001

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KESEHATAN

Jl. J.H. Ahmad Dahlan No. 58 Padang Panjang 27122 (0752) 83148
Fax (0752) 83148 Email: dinkes.kotapadangpanjang@gmail.com



PERJALANAN KINERJA TAHUN 2019

Untuk rangka dan tujuan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada nilai-nilai yang berlandaskan pada nilai-nilai sebagai berikut:

Nama: Dr. H. Nuryati, Apt, M.M, Kes

Jabatan: Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang

Unit Kerja: Bidang PIHAK PERTAMA

Nama: AGLY AMIRAN, SBA

Jabatan: Wakil Kota Padang Panjang

Selama pelaksanaan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA adalah pelaksanaan tugas-tugas yang selaras dengan tugas pokok
dan fungsi instansi yang bersangkutan. Adapun yang telah dilakukan
dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut adalah sebagai berikut:
menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan memberikan dukungan yang dibutuhkan serta akan melakukan evaluasi
terhadap kinerja yang telah dilakukan dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
penyempurnaan pelaksanaan tugas-tugas tersebut.

Padang Panjang, 11 Maret 2019
KEPALA DINAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
DIE NURYATI, Apt, M.M, Kes
No. 198/123/1981/1.001

WALIKOTA PADANG PANJANG
PIHAK KEDUA
AGLY AMIRAN, SBA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KESEHATAN
KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tercapainya Masyarakat Sehat	- Indeks Keluarga Sehat	0,35
		- Persentase Stunting	17,50%
		- Angka Kematian Ibu (AKI)	0
		- Angka Kematian Bayi (AKB)	12
		- Persentase UHC	96,25%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	886.278.000
2.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	15.420.484.500
3.	Program pengawasan Obat dan Makanan	96.780.000
4.	Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	271.125.000
5.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	198.074.000
6.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	729.200.000
7.	Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular	303.523.000
8.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	233.727.500
9.	Program Pengadaan,Peningkatan dan perbaikan sarana dan Prasarana	1.007.097.000
10.	Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya	
11.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	33.500.000
12.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	332.565.000
13.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	401.500.000


WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 11 Maret 2019
**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PADANG PANJANG**


Drs. NURYANNUWAR, Apt, MM, M.Kes
NIP. 19720513 200501 1 009

PERALIHAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KESEHATAN
KOTA PADANG PANJANG

NO	PASALAN STATE GIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terdapatnya Masyarakat Sehat	Indeks Kinerja Sehat	0,88
		Persentase Cacing	17,80%
		Angka Kematian Ibu (AKI)	0
		Angka Kematian Bayi (AKB)	12
		Persentase UHC	94,28%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	630.278.000
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	12.420.484.500
3	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	22.780.000
4	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	37.125.000
5	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	198.074.000
6	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	124.200.000
7	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	303.823.000
8	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	332.727.500
9	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1.097.097.000
10	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	33.800.000
11	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	632.882.000
12	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	401.800.000

Padang Panjang, 1 Maret 2019
DINAS KESEHATAN
KOTA PADANG PANJANG



Dr. NURYAN, A. A. M. M. M. M. M.
KORPORASI 200811400

WALIKOTA PADANG PANJANG

HADLY AMRAN, S. S. A.





**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Soekarno-Hatta No. 104 Telp. (0752) 82565 Fax. (0752) 82565 Padang Panjang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YAS EDIZARWIN, SH

Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


**PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG**
FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 11 Maret 2019
**PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**


YAS EDIZARWIN, SH
NIP. 19630727 199203 1 004

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG



Jl. S. K. M. H. No. 104 Telp. (0751) 81502 Padang Panjang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil yang berkeadilan dan berkeadilan

Nama : YAS EDI ARYAN S.H.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG
PANJANG

Selanjutnya Pihak Pertama,
Nama : T. OLY ANRANI SBA

Jabatan : WAKIL KOTA PADANG PANJANG

Sejalan dengan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selarasnya sesuai dengan
kegiatan yang akan dilaksanakan yang akan menunjang tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan dan kegiatan pencapaian target kinerja tersebut
dengan menggunakan sumber daya yang ada.

Pihak Kedua akan memberikan pelayanan yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap kinerja kedua belah pihak dan perjanjian ini akan mengikat kedua belah pihak dalam rangka
pembentukan perjanjian dan sanksi.

Padang Panjang, 11 April 2019
PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

PIHAK KEDUA
WAKIL KOTA PADANG PANJANG

YAS EDI ARYAN S.H.
NIP. 19630721 19503 1 004

T. OLY ANRANI SBA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya infrastruktur dasar publik yang sesuai standar	- Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	90,50%
		- Persentase trotoar jalur utama yang ramah disabilitas	17%
		- Persentase Rumah Tinggal dengan bersanitasi layak	79%
		- Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	88%
		- Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	100%
		- Proporsi tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	27%
2	Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang	- Luasan Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20% dari luas	2,46%
		- Rasio Bangunan ber IMB persatuan bangunan	49/64

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Pembangunan Jalan dan jembatan	10.119.550.000
2.	Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	9.398.855.000
3.	Pembangunan dan Pemeliharaan Trotoar	3.729.975.000
4.	Bangunan Air kotor Perkotaan	3.629.000.000
5.	Pembangunan Kinerja Air Minum dan Air Limbah	2.367.810.800
6.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	300.000.000
7.	Pembinaan Jasa Konstruksi	318.135.000
8.	Pengelolaan Ruang Terbuka hijau	4.490.007.550
9.	Perencanaan, penataan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	728.098.800



WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 11 Maret 2019
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG**


YAS EDIZARWIN, SH
 NIP.196307271992031004

PERJANJIAN KERJASAMA TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERATAAN RUANG
KOTA PADANG PANJANG

NO	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJASAMA	TARGET
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	- Peningkatan jumlah layanan publik - Peningkatan kualitas pelayanan publik	100%
2	Meningkatkan kinerja aparatur sipil negara	- Peningkatan jumlah aparatur sipil negara - Peningkatan kualitas kinerja aparatur sipil negara	100%
3	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	- Peningkatan jumlah kegiatan lingkungan hidup - Peningkatan kualitas lingkungan hidup	100%
4	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	- Peningkatan jumlah kegiatan kesehatan masyarakat - Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	100%
5	Meningkatkan kualitas infrastruktur	- Peningkatan jumlah kegiatan infrastruktur - Peningkatan kualitas infrastruktur	100%

ANGGARAN
 10.100.000.000
 8.300.000.000
 3.100.000.000
 3.000.000.000
 1.800.000.000
 300.000.000
 3.180.000.000
 4.400.000.000
 11.000.000.000

- NO**
1. Peningkatan jumlah layanan publik
 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik
 3. Peningkatan jumlah aparatur sipil negara
 4. Peningkatan kualitas kinerja aparatur sipil negara
 5. Peningkatan jumlah kegiatan lingkungan hidup
 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
 7. Peningkatan jumlah kegiatan kesehatan masyarakat
 8. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
 9. Peningkatan jumlah kegiatan infrastruktur
 10. Peningkatan kualitas infrastruktur

Padang Panjang, 11 Maret 2018
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG


 YAS EDIZA WILIS
 NIP. 196307211902031004

WALIKOTA PADANG PANJANG


 HERY ANWAR BBA



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

JL. KH. Ahmad Dahlan No.1 Padang Panjang 27128 Telp (0752) 485541
Email : perkimlhpp@gmail.com Website : www.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WITA DESI SUSANTI, ST
Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA
Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku Atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

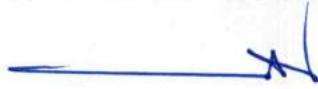
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG**

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 11 Maret 2019
**PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG**


**WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 19741223 200212 2 002**

**PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

Jl. KEMERDEKAAN No. 10 Padang Panjang 27132 Telp. (0752) 453241
Email: sekretaris@kpwk.kabupatirangrang.go.id



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Diangkat sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Pangkajene Arung Macassar dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang berkeadilan dan berkeadilan.

Judul: Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Penyusun: Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang
Disetujui: Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Tempat: Padang Panjang
Tanggal: 11 Maret 2019

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang menunjukkan secara jelas dan terukur tentang apa yang akan dilakukan oleh instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Padang Panjang, 11 Maret 2019
PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG

PIHAK KEDUA
WALI KOTA PADANG PANJANG

WITA DEWI SUSANTI, SE
NIP. 19740223 200212 2 002

RANY KAMBAY, S.P.A

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penyediaan hunian layak bagi masyarakat	- Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak	100%
		- Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%
2	Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman	Persentase pemukiman layak huni	82%
3	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	- Indeks Kualitas Air (IKA)	40,50 - 41,40
		- Indeks Kualitas Udara (IKU)	90 - 93,5
		- Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	65,26

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemukiman	10.569.965.000
2.	Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Pemukiman	892.750.000
3.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Perkotaan	7.836.171.350
4.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	1.076.520.000
5.	Pengendalian Pencemaran , Perusakan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	980.700.000
6.	Pembangunan Berkelanjutan	21.228.000
7.	Pengendalian Perubahan Iklim	130.275.000



Padang Panjang, 11 Maret 2019
**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG**

WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 19741223 200212 2 002

PELUTSIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG

NO	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			1
1	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan meningkatkan daya saing masyarakat	Jumlah warga yang terakreditasi yang memperoleh layanan yang berkualitas	100%
2	Meningkatkan kualitas lingkungan dan kualitas hidup masyarakat	Persentase pemukiman layak huni	85%
3	Meningkatkan kualitas lingkungan dan kualitas hidup masyarakat	Indeks Kualitas Udara (IKU)	40,80 - 41,40
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	00 - 00,8
		Indeks Kualitas Lingkungan (IKL)	00,26

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman	10.980.903.000
2	Pengembangan dan pemeliharaan kawasan permukiman	893.750.000
3	Pengembangan kawasan permukiman permukiman	7.990.171.350
4	Peningkatan kualitas lingkungan dan kualitas hidup masyarakat	1.078.850.000
5	Pengembangan kawasan permukiman dan pemeliharaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	980.700.000
6	Peningkatan kualitas lingkungan	24.250.000
7	Pengembangan permukiman	100.250.000

Padang Panjang, 11 Maret 2019
 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
 PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 KOTA PADANG PANJANG

WITA DEB SUSANTI ST
 NIP. 19741223 200312 2 002

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN SGA



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERHUBUNGAN**

Jln. Prof. Dr.HAMKA No. 87 TEL.(0752) 82051
Kota Padang Panjang 27115

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I PUTU VENDA, S.STP, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 11 Maret 2019
PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

I PUTU VENDA, S.STP, M.Si
NIP. 19770522 199511 1 001

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERHUBUNGAN

Jln. Prnt. D. HAMKHA No. 87, TEL: (0752) 85051
Kota Padang Panjang 27113



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Pada tanggal 15 Februari 2019, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, telah diadakan pertemuan antara Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dan Kepala Dinas Perhubungan Kecamatan Padang Panjang yang dihadiri oleh:

Nama : I PUTU VINDA, S.STP, M.P.
Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : RADY AMRAN, S.SA
Jabatan : WALI KOTA PADANG PANJANG

Diikuti oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebenarnya sesuai lampiran perjanjian ini dan akan melakukan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan dan kegiatan. Sedangkan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan memberikan dukungan yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap kegiatan kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka perbaikan/pengendalian kinerja.

Padang Panjang, 17 Maret 2019
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
I PUTU VINDA, S.STP, M.P.
001 85052 10011 7 001

WALI KOTA PADANG PANJANG
RADY AMRAN, S.SA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Ketertiban Lalu Lintas	Jumlah Angka Kecelakaan	37
2	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Jalan	- Persentase panjang trayek jalan	27,02%
		- Persentase Kendaraan Lolos Uji KIR	97,56%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	202.730.000
2.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	215.600.000
3.	Peningkatan Pelayanan Angkutan	825.719.500
4.	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	598.750.000


WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 11 Maret 2019
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG**

I PUTU VENDA, S.STP, M.Si
NIP. 19770522 199511 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Pelayanan Bagi Wisatawan	Jumlah Angka Kecapaian	8
2	Meningkatkan Pelayanan Bagi Wisatawan	Persentase orang tua yang puas	97,02
		Persentase wisatawan lokal yang puas	97,55

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Peningkatan Pelayanan Bagi Wisatawan dan Fasilitas	202.730.000
2	Program Peningkatan Pelayanan Bagi Wisatawan dan Fasilitas	218.000.000
3	Peningkatan Pelayanan Bagi Wisatawan	828.719.800
4	Peningkatan Pelayanan Bagi Wisatawan dan Fasilitas	208.730.000


 FUTURE VISION, 2 STR, M.SI
 NIP. 1973022 195011 1 001
 Padang Panjang, 11 Maret 2019
 KOTA PADANG PANJANG
 DINAS PERHUBUNGAN

WALIKOTA PADANG PANJANG

RIZKI ARIAN, S.P.



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

Jalan Sutan Syahrir No. 189, Telp/Fax. (0752) 83143
Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat
Kota Padang Panjang 27118

Website : dukcapil.padangpanjang.go.id - Email: disdukcapil@padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. MAINI, MM
Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA
Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 11 Maret 2019
PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

Dra. MAINI, MM
NIP. 19640505 199003 2 007

PEMERINTAH KOTA PADANG PADANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL



Jalan Pemuda No. 100 Padang 25133
Telp. (075) 7411111, 7411112, 7411113
Faks. (075) 7411114, 7411115
Email: kpendudukan@padang.go.id

PERJALANAN KEMERJA TAHUN 2019

No	Nama Karyawan	Jenis Perjalanan	Tanggal	Tempat	Biaya
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Perjalanan dinas ini dilaksanakan pada tanggal ... di ...
dengan tujuan ... dan ...
Biaya perjalanan ini dibebankan ke ...
dan ...
Demikian ...
Padang, ...
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pihak Pertama

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pihak Kedua

...

...

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	- Lama waktu pelayanan dokumen administrasi kependudukan	45 menit
		- Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	85%
		- Persentase keakuratan data kependudukan	99.75%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Penataan Administrasi Kependudukan	1,059,569,000
2.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	191,000,000

WALIKOTA PADANG PANJANG



FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 11 Maret 2019
**KERALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG**



Dra. MAINI, MM
NIP. 19640505 199003 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2012
DINAS PERENCANAAN DAN PENGANTARAN SIPIL
KOTA PADANG LAMPUNG

NO	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARUHAN
1	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan kepuasan masyarakat	100%
2	Meningkatkan kinerja aparatur sipil negara	Peningkatan produktivitas kerja aparatur sipil negara	100%
3	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik	100%

KELOMPOK
KORPORASI
KORPORASI

PROGRAM
KORPORASI
KORPORASI

Perjanjian Kinerja Tahun 2012
DINAS PERENCANAAN DAN PENGANTARAN SIPIL
KOTA PADANG LAMPUNG

KOTA PADANG LAMPUNG

Dit. Man. N
No. 100/1000/2012

RAJIB



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Prof. Dr. Hamka No. 87 Telp./Fax (0752) 82815 Padang Panjang 27114
Email : kominfo.kotapadangpanjang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARWILIS, SH, M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA
Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku Atasan Langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 11 Maret 2019
PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

MARWILIS, SH, M.Si
NIP. 196107031982031008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	Indeks SPBE	3%
2	Meningkatnya Penerapan Teknologi Informasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Penerapan Teknologi Informasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	25%
3	Meningkatnya diseminasi penerapan dan komunikasi publik terkait pembangunan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Layanan	70%
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan, penyebaran informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	70%
5	Terlaksananya pengamanan informasi pemerintah daerah	Indeks Keamanan Informasi	25%
6	Tersedianya data yang memenuhi standar satu data indonesia	Persentase data yang memenuhi standar satu data indonesia	25%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	e-Government	7.990.214.000
2.	Pengembangan data, Informasi Statistik Sektoral	58.335.000
3.	Persandian dan Pengamanan Informasi	23.520.000
4.	Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	2.388.755.325

WALIKOTA PADANG PANJANG



FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 11 Maret 2019
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PADANG PANJANG**



MARWILIS, SH., M.Si
NIP. 196107031982031008

PERJALANAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	1	2	3
1	Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-Government)	Indeks SPBE	30%
2	Meningkatkan Pelayanan Teknologi Informasi Daerah	Pelayanan Pelayanan Teknologi Informasi Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	50%
3	Meningkatkan Sistem dan Pengembangan dan komunikasi publik tingkat pemerintahan daerah	Indeks Kelembagaan Masyarakat Terpadu Kualitas Layanan	70%
4	Meningkatkan Kualitas pelayanan, pelayanan informasi publik	Indeks Kelembagaan Informasi Publik	70%
5	Terdapatnya pendataan informasi pemerintahan daerah	Indeks Kelembagaan Informasi	50%
6	Terdapatnya data yang memenuhi standar nasional data	Pelayanan data yang memenuhi standar data Indonesia	30%

ANGGARAN
1.900.214.000
58.335.000
23.520.000
1.881.755.000

NO PROGRAM
1. e-Government
2. Pengembangan data, Informasi Statistik, Statistik
3. Peningkatan dan Pengembangan Informasi
4. Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik

Padang Panjang, 17 Maret 2019
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PADANG PANJANG

MARWILIS SH. M.Si
NIP. 19670703 198203 1 006

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMAN, BBA



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Jl. Sutan Syahrir Nomor 150 Silaing Bawah Telepon/Fax (0752) 485395
Email: dpmpmsp_padangpanjang@yahoo.co.id Kode Pos: 27118**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EWASOSKA, SH
Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA
Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 11 Maret 2019

**PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG**



FADLY AMRAN, BBA



**EWASOSKA, SH
NIP. 19750103 200003 1 003**

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Setan Syarif Nomor 150211111 Bawah Telephone/Fax (0752) 488395
Email: domptsp_padangpanjang@yahoo.co.id Kode Pos: 27118

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang berlandaskan pada visi misi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Nama : EWASOSKA, SH
Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : FADLY AMRAN, BBA
Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan melakukan target kinerja yang selanjutnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemertan pelaksanaan dan

Padang Panjang, 11 Maret 2019
PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

EWASOSKA, SH
NIP. 19750103 200003 1 003


PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Peserta Pelatihan Yang Ditempatkan	30%
2	Meningkatnya Nilai Investasi	Pertambahan Nilai Investasi Swasta	20 M
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Peningkatan Kesempatan Kerja	133.467.500
2.	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	294.150.000
3.	Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	38.939.500


WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 11 Maret 2019
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANG PANJANG


EWASOSKA, SH
NIP. 19750103 200003 1 003

REKAM JEJAK KINERJA TAHUN 2018
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Perbaikan Pelayanan BPP	Persentase Pemenuhan Pelayanan Yang Diperlukan	100%
2	Perbaikan Pelayanan Investasi	Persentase Realisasi Investasi Swasta	30 M
3	Perbaikan Pelayanan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat Terhadap	Indeks Kepuasan Masyarakat	80%

ANGGARAN
133.487.500
384.120.000
88.930.800

NO PROGRAM
1. Perbaikan Pelayanan BPP
2. Perbaikan Pelayanan Investasi
3. Perbaikan Pelayanan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat Terhadap

Padang Panjang, 11 Maret 2018
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANG PANJANG

EWARISKA, SH
NIP. 49750102 200602 1 003

WALIKOTA PADANG PANJANG

FALSY MIRAN, BBA



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS PARIWISATA

Komplek Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM)
Silaing Bawah Telepon/Fax. (0752) 84164 Padang Panjang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRI FAUZAN, AP.M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA
Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN BBA

Padang Panjang, 11 Maret 2019

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PARIWISATA
HENDRI FAUZAN, AP.M.Si
NIP. 19740409 199501 1 001

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PARIWISATA



Jalan Daulat, Padang Panjang (Telp: 0752 84104 Padang Panjang)
Nomor Dokumen: ...

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Salah satu kewajiban manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang terencana adalah di bawah ini:

Nama: HENDRI ERIYAN, A.P.M. SI
Jabatan: KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG

Nama: FADLY AMRAN, SBA
Jabatan: WAKIL KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA dan akan menandatangani target kinerja yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian kinerja yang terencana dan terukur yang akan menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut untuk periode waktu tertentu.
PIHAK KEDUA, yang memberikan persetujuan yang diberikan akan melakukan evaluasi terhadap kinerja dan memberikan laporan yang diperlukan dalam rangka pemantauan pelaksanaan dan evaluasi.

Padang Panjang, 11 Maret 2019
PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PARIWISATA

HENDRI ERIYAN, A.P.M. SI
NIP. 19740408 198501 1 001


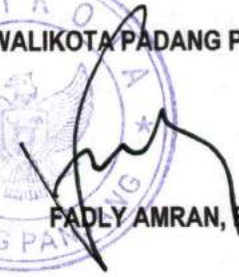
PIHAK KEDUA
WAKIL KOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, SBA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan wisatawan	655.841 orang

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2.385.225.000
2.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	2.664.316.000
3.	Program Pengembangan Kemitraan	197.199.000
4.	Program Pengembangan Objek Wisata Unggulan	767.110.000


WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 11 Maret 2019
**KEPALA DINAS PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG**

HENDRI FAUZAN, AP.M.SI
NIP. 19740409 199501 1 001

PERJANJIAN KERJA SAMA TAHUN 2019
DINAS PARAWATA
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	1	2	3
1	Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	652.847 orang

ANGGARAN
2.388.225.000
2.584.378.000
107.153.000
7.7.110.000

NO PROGRAM
1. Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata
2. Peningkatan dan Diversifikasi Pariwisata
3. Pengembangan dan Peningkatan
4. Pengembangan dan Peningkatan

Padang Panjang, 11 Maret 2019
 KEPALA DINAS PARAWATA
 KOTA PADANG PANJANG

HENRI LAUSAN AP. M. SI
 NIP. 197104091998011001

KOTA PADANG PANJANG

D. G. ARMAN, SBA



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jln. Urip Sumoharjo No. 532 Padang Panjang Kode Pos 27128

Telp. (0752) 485312 Fax. (0752) 485312

Email: kpad.padangpanjang@gmail.com – website: www.padangpanjangkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALVISENA,ST.MT

Jabatan : KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA


Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


**PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG**
FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 11 Maret 2019
**PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN**

ALVISENA,ST.MT
NIP. 19750825 200212 1 004

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**



Jl. Ling. Sempurna No. 232 Padang Panjang Kota Pas 27138
Telp. (0752) 483331 Fax. (0752) 483312
Email: karsip@padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Pemerintah Kota Padang Panjang menetapkan target kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang berbeda-beda di berbagai

Nama	Jabatan
ALVISEN A ST.MT	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PAJAY AMAN, SBA	WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku Kepala Dinas PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN, saya berjanji akan melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab, jujur, disiplin, dan berorientasi pada hasil. Saya akan melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab, jujur, disiplin, dan berorientasi pada hasil. Saya akan melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab, jujur, disiplin, dan berorientasi pada hasil.

Padang Panjang, 11 Maret 2019
ALVISEN A ST.MT
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

WALIKOTA PADANG PANJANG
PAJAY AMAN, SBA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kunjungan perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan	23.400 Orang
2	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan	Jumlah pencipta arsip yang melaksanakan kearsipan sesuai prosedur yang ditetapkan	20 Pencipta Arsip

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan	2.493.971.000
2.	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	422.897.000

WALIKOTA PADANG PANJANG



(FADLY AMRAN, BBA)

Padang Panjang, 11 Maret 2019
**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PADANG PANJANG**



ALVI SENA, ST, MT
NIP. 19750825 200212 1 004

PERALIHAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PADANG PANJANG

NO	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya jumlah kunjungan	Jumlah pengunjung perpustakaan	27400 orang
2	Meningkatnya layanan keanggotaan	Jumlah pemustaka yang telah melakukan keanggotaan sesuai prosedur yang ditetapkan	20 Pemustaka

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pengembangan Budaya baca dan Peningkatan Fasilitas	1.493.871.000
2	Program Pelayanan dan Peningkatan Dokumentasi Daerah	422.987.000

KOTA PADANG PANJANG
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Padang Panjang, 11 Maret 2019

ALVI BENA, ST, MT
NIP. 19720825 2002121 004

WALIKOTA PADANG PANJANG

OLY AMRAN, SBA



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Jl. Ahmad Yani No. 30 Kelurahan Ngalau Padang Panjang Timur
Kota Padang Panjang Kode Pos 27124. Telp./Fax (0752) 82119.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAHDANUR, SH. MM

Jabatan : KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 11 Maret 2019
PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

SYAHDANUR, SH. MM
NIP. 19640815 199003 1 009

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Jl. Andalas Yuni No. 32 Kelurahan Nagari Padang Panjang
 Kota Padang Panjang, Sumatra Barat 25119 Telp: (0755) 84119



PERJALANAN KIBERA TAHUN 2019

Untuk pelaksanaan KIBERA tahun 2019, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang telah melaksanakan kegiatan KIBERA yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2019 di Kecamatan Nagari Padang Panjang.

Tempat : Kecamatan Nagari Padang Panjang
 Tanggal : 11 Maret 2019

Jabatan : WAKIL KOTA PADANG PANJANG
 Nama : FADLIL AMRAN BBA

Selama pelaksanaan KIBERA, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang telah melaksanakan kegiatan KIBERA yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2019 di Kecamatan Nagari Padang Panjang. Kegiatan KIBERA dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan petani. Kegiatan KIBERA dilaksanakan dengan cara berkeliling ke rumah petani untuk memberikan penyuluhan langsung kepada petani. Kegiatan KIBERA dilaksanakan dengan cara berkeliling ke rumah petani untuk memberikan penyuluhan langsung kepada petani. Kegiatan KIBERA dilaksanakan dengan cara berkeliling ke rumah petani untuk memberikan penyuluhan langsung kepada petani.

Padang Panjang, 11 Maret 2019
 FADLIL AMRAN BBA
 WAKIL KOTA PADANG PANJANG

WAKIL KOTA PADANG PANJANG
 FADLIL AMRAN BBA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Konsumsi Pangan Masyarakat Sesuai Kaidah B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman)	Skor Pola pangan Harapan (PPH)	85
2	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat Untuk Layanan : kesehatan Hewan, Pemotongan Hewan, Penyediaan Benih Ikan, Pembesaran Anak Sapi, Penyakit Hama dan Tanaman	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	77
3	Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan	- Produktivitas Perternakan/Produk Peternakan	10,10 Liter/Ekor/Hari
		- Produksi Budidaya Perikanan	650 Ton
		- Produktivitas Padi	5,70 Ton/Ha
		- Persentase Terbentuknya Klaster Tanaman Hias	5%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Peningkatan Ketahanan Pangan	882.304.800
2.	Pengembangan Budidaya Perikanan	590.609.000
3.	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan	1.783.728.000
4.	Peningkatan Kesejahteraan Petani	74.999.800
5.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	307.565.000
6.	Peningkatan Produksi Hasil Pertanian	1.973.464.300

WALIKOTA PADANG PANJANG



FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 11 Maret 2019
**KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PADANG PANJANG**



SYAHDANUR, SH. MM
NIP. 19640815 199003 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PADANG PARANG

NO	STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	1. Meningkatkan Kualitas Produk Pangan dan Pertanian	1.1. Jumlah Produk Pangan dan Pertanian yang Berkualitas	85
2	2. Meningkatkan Efisiensi Biaya Produksi Pangan dan Pertanian	2.1. Jumlah Biaya Produksi Pangan dan Pertanian yang Efisien	77
3	3. Meningkatkan Daya Saing Produk Pangan dan Pertanian	3.1. Jumlah Produk Pangan dan Pertanian yang Daya Saing	80

ANGGARAN
Rp. 1.200.000.000
Rp. 1.000.000.000
Rp. 200.000.000
Rp. 100.000.000
Rp. 50.000.000
Rp. 25.000.000

PROGRAM
1. Peningkatan Kualitas Produk Pangan dan Pertanian
2. Peningkatan Efisiensi Biaya Produksi Pangan dan Pertanian
3. Peningkatan Daya Saing Produk Pangan dan Pertanian
4. Peningkatan Kualitas Produk Pangan dan Pertanian
5. Peningkatan Efisiensi Biaya Produksi Pangan dan Pertanian
6. Peningkatan Daya Saing Produk Pangan dan Pertanian

KOTA PADANG PARANG
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
Padang, 11 Maret 2019

KOTA PADANG PARANG

SYAHRIANUR RAHMAN
M.P. 198408121000111000

RIZKY AMALIA S.P.



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA
KECIL DAN MENENGAH**

Jln. St. Syahrir No. 124 Telp. (0752) – 82243 Fax (0752) – 82243 PADANG PANJANG - 27118

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARPAN, SH

Jabatan : KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG**



FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 11 Maret 2019

**PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA PADANG PANJANG**



ARPAN, SH
NIP. 19611111 198603 1 018

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
 DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA
 KECIL DAN MENENGAH



PERALIHAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mendukung manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta profesional pada level yang berbeda-beda terdapat di bawah ini:

Nama: ARPAN SH
 Jabatan: KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama: FARLY AMRAN BBA
 Jabatan: WAKIL KOTA PADANG PANJANG

Sebelumnya PIHAK PERTAMA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan melakukan target kinerja yang selaras dengan visi misi dan tujuan organisasi. PIHAK PERTAMA akan melakukan target kinerja yang selaras dengan visi misi dan tujuan organisasi. PIHAK KEDUA akan melakukan target kinerja yang selaras dengan visi misi dan tujuan organisasi. PIHAK KEDUA akan melakukan target kinerja yang selaras dengan visi misi dan tujuan organisasi. PIHAK KEDUA akan melakukan target kinerja yang selaras dengan visi misi dan tujuan organisasi.

Padang Panjang, 11 Maret 2019
 PIHAK PERTAMA
 KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI
 USAHA KECIL DAN MENENGAH
 KOTA PADANG PANJANG

PIHAK KEDUA
 WAKIL KOTA PADANG PANJANG

ARPAN SH
 NIP. 19811111 198803 1 019

FARLY AMRAN BBA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perdagangan	Persentase Kenaikan Nilai Volume Perdagangan	7,91
2	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	Persentase Peningkatan Produktivitas Industri Kecil Menengah	1,37
3	Meningkatnya Koperasi Aktif Berpola Syariah	Persentase Koperasi Aktif Berpola Syariah	37,50
4	Meningkatnya Skala Usaha Mikro Kecil	Persentase Peningkatan Skala Usaha Usaha Mikro Kecil	0,51
5	Mengurangi Kemiskinan di Sektor Usaha Mikro Kecil	Persentase Angka Kemiskinan di Sektor Usaha Menengah Kecil	51,5
6	Menumbuhkan Wirausahawan Baru	Persentase Pertumbuhan Wirausahawan Baru	0,71

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Rp 1.469.950.000
2.	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Rp 467.000.000
3.	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp 734.340.000
4.	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp 2.458.863.000
5.	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	Rp 197.545.000
6.	Pengembangan Industri Kecil Menengah	Rp 1.343.544.000
7.	Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Rp 720.070.000

WALIKOTA PADANG PANJANG



FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 11 Maret 2019
KERALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA PADANG PANJANG



ARPAN, SH
NIP. 19611111 198603 1 018

REKAM JEJAK PERUSAHAAN
 DAN KEMAMPUAN KEHIMPUNAN
 KEMAHIRAN

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN	JENIS PERUSAHAAN
1	PT. BUKIT MURNI	Jl. Raya B. No. 123	Perdagangan
2	PT. SRI MURNI	Jl. Raya B. No. 124	Perdagangan
3	PT. SRI MURNI	Jl. Raya B. No. 125	Perdagangan
4	PT. SRI MURNI	Jl. Raya B. No. 126	Perdagangan
5	PT. SRI MURNI	Jl. Raya B. No. 127	Perdagangan
6	PT. SRI MURNI	Jl. Raya B. No. 128	Perdagangan
7	PT. SRI MURNI	Jl. Raya B. No. 129	Perdagangan
8	PT. SRI MURNI	Jl. Raya B. No. 130	Perdagangan

REKAM JEJAK PERUSAHAAN DAN KEMAMPUAN KEHIMPUNAN KEMAHIRAN
 NO. 123456789
 JENIS PERUSAHAAN: PERDAGANGAN
 ALAMAT PERUSAHAAN: Jl. Raya B. No. 123
 NAMA PERUSAHAAN: PT. BUKIT MURNI

REKAM JEJAK PERUSAHAAN DAN KEMAMPUAN KEHIMPUNAN KEMAHIRAN
 NO. 123456789
 JENIS PERUSAHAAN: PERDAGANGAN
 ALAMAT PERUSAHAAN: Jl. Raya B. No. 123
 NAMA PERUSAHAAN: PT. BUKIT MURNI





**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jl. Prof M. Yamin, SH No. 02 Padang Panjang, Telp/Fax (0752) 484809
Email: polppadangpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARKES REFAGUS, S.Sos
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG


Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA
Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG**

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 11 Maret 2019
**PIHAK PERTAMA
KEPALA SATPOL PP DAN PEMADAM
KEBAKARAN**


**ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP. 19651112 198602 1 002**

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN



Jl. P. M. Yamin SH No. 02 Padang Panjang, Telp/Fax (0752) 402309
Email aripri@padangpanjang.go.id - Web: www.padangpanjang.go.id

PERALIHAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka meningkatkan manajemen dan kinerja aparatur sipil negara, khususnya aparatur sipil negara yang berada di lingkungan

pekerjaan, maka perlu diadakan penilaian kinerja yang dilakukan secara

nama : ARKES REFAGUS S. SOA

jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

nama : ADLY AMRAB, REA

nama : ADLY AMRAB, REA

jabatan : WAKIL KOTA PADANG PANJANG

Setelah melalui proses penilaian, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA akan menunjukkan target kinerja yang seharusnya sesuai jumlah

pekerjaan yang harus dilakukan target kinerja tersebut dengan baik dan benar yang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan, kemudian, PIHAK KEDUA akan menunjukkan pencapaian target kinerja tersebut

menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan evaluasi yang dilakukan secara sistematis melalui evaluasi

terhadap capaian kinerja, dan penilaian ini akan menjadi acuan yang digunakan dalam rangka

penyusunan anggaran dan sarana.

Padang Panjang, 14 Maret 2019

PIHAK PERTAMA
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN

PIHAK KEDUA
WAKIL KOTA PADANG PANJANG

ARKES REFAGUS S. SOA
NIP. 19851112 198902 1 005

ADLY AMRAB, REA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	- Persentase Penegakan Perda	97%
2	Meningkatnya peran dan fungsi perlindungan masyarakat	- Persentase Pemberdayaan Petugas Satlinmas	100%
3	Meningkatnya cakupan pelayanan penanganan bahaya kebakaran	- Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	4.558.679.000
2.	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	520.962.000
3.	Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1.940.280.000

WALIKOTA PADANG PANJANG



FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 11 Maret 2019
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

ARKES REFAGUS, S. Sos
NIP. 19651112 198602 1 002

PERJALAN KINERJA TAHUN 2019
SATUAN POLISI RAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG

NO	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan kinerja masyarakat terhadap tindakan pencegahan dan pemadaman kebakaran	Peningkatan Pengetahuan Tindakan	75%
2	Meningkatkan peran dan tingkat keterlibatan masyarakat	Partisipasi Masyarakat Partisipasi Pemadam	100%
3	Meningkatkan kecepatan pelayanan pemadaman kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	100%

ANGGARAN
1.338.818.000
520.962.000
1.240.580.000

PROGRAM
1. Pemeliharaan, pemadaman dan pencegahan kebakaran
2. Pemeliharaan, pemadaman, pencegahan kebakaran dan kesiapsiagaan
3. Pemeliharaan, pemadaman, pencegahan kebakaran

Padang Panjang, 11 Maret 2019
KEPALA SATUAN POLISI RAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

ARKIS RIFAELUS, S.Sos
NIP. 19851121988021702

WALIKOTA PADANG PANJANG

TANJUNGPINANG, 11 MARET 2019



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 4 Telp. (0752) 83147-83148 Fax 484623 Padang Panjang
Email: kominfo.pdgpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA
Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 11 Maret 2019

**PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG**


FADLY AMRAN, BBA

**PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**


SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si
NIP. 19750331 199501 1 001

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



Jalan Khatolik, Kelurahan Khatolik, Kecamatan Khatolik, Kota Padang Panjang
 Telp. (0752) 821111, Faks. (0752) 821111, Email: khatolik@padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kerja ini dibuat oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang. Adapun nama-nama pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pelaksanaan Perjanjian Kerja ini adalah sebagai berikut:


Jabatan	Nama
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang	SONNY BUDAYA PUTRA, A.P., M.Si
Wakil Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang	FAHRI AJARAN, S.P.A

Selain itu, sebagai penanggung jawab pelaksanaan Perjanjian Kerja ini, Pemerintah Kota Padang Panjang menunjuk dan menunjuk kembali sebagai penanggung jawab pelaksanaan Perjanjian Kerja ini adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Wakil Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang	FAHRI AJARAN, S.P.A

Perjanjian Kerja ini dibuat untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang. Perjanjian Kerja ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Perjanjian Kerja ini dibuat dalam dua rangkai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan pendapat antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Apabila musyawarah tidak dapat mencapai kesepakatan, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

Padang Panjang, 11 Maret 2019
PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG


SONNY BUDAYA PUTRA, A.P., M.Si
 NIP. 1975031198011001

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG


FAHRI AJARAN, S.P.A

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Rata-Rata Ketercapaian Sasaran Daerah	75%


NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Pengembangan Data dan Informasi	133.399.800
2.	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	144.174.500
3.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	973.411.700
4.	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	16.014.800
5.	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	275.046.300
6.	Program Penelitian dan Pengembangan	1.515.900.100
7.	Program Penguatan Inovasi Daerah	46.330.000

WALIKOTA PADANG PANJANG



FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 11 Maret 2019
KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG



SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M. SI
NIP. 19750331 199501 1 001

PERJALAN KINERJA TAHUN 2019
DAFTAR PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan	Sesuai Rata-Rata * standar	120
2	Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan	Sesuai Rata-Rata * standar	120

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pemeliharaan Data dan Informasi	132.900.000
2	Program Peningkatan Penggunaan Bidang Statistik Wilayah dan Sumber Daya Manusia	144.171.500
3	Program Peningkatan Penggunaan Bidang Statistik Wilayah dan Sumber Daya Manusia	453.411.700
4	Program Peningkatan Penggunaan Bidang Statistik Wilayah dan Sumber Daya Manusia	18.074.800
5	Program Peningkatan Penggunaan Bidang Statistik Wilayah dan Sumber Daya Manusia	312.042.500
6	Program Peningkatan Penggunaan Bidang Statistik Wilayah dan Sumber Daya Manusia	1.012.900.100
7	Program Peningkatan Penggunaan Bidang Statistik Wilayah dan Sumber Daya Manusia	41.370.000

Padang Panjang, 11 Maret 2019
**KETUA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
 DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
KOTA PADANG PANJANG

SONNY BUDAYA PUTRA, S.P., M.Si
 NIP. 18150131 19907 1 001

WALIKOTA PADANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Anas Karim No. 14 Pasar Usang Telp. (0752) 83487 Padang Panjang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARTONI, S. Sos, M. Si

Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 11 Maret 2019
PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PPKB PPPA


MARTONI, S. Sos, M. Si
NIP. 197303041993081001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan cakupan PJKMS yang mendapatkan pelayanan sosial	Persentase PMKS yang tertangani	45,00%
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang Aktif	70%
3	Meningkatkan pemenuhan anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya
4	Meningkatkan pemberdayaan perempuan	Predikat APE	Pratama
5	Meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,40%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	608.583.500
2.	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	996.465.000
3.	Rehabilitasi Sosial Korban Bencana	150.000.000
4.	Pembinaan Anak Terlantar	30.775.000
5.	Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	99.505.000
6.	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	677.282.000
7.	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	341.525.000
8.	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	343.904.000
9.	Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	250.800.000
10.	Peningkatan kelembagaan masyarakat kelurahan	2.186.607.000
11.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	274.895.000
12.	Peningkatan pemberdayaan kelembagaan adat	604.800.000
13.	Keluarga Berencana	2.601.887.000
14.	Kesehatan Reproduksi Remaja	322.145.000
15.	Pelayanan Kontrasepsi	62.500.000
16.	Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri	213.986.000
17.	Peningkatan pengendalian penduduk	60.125.000


WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 11 Maret 2019
KEPALA DINAS PPKB PPPA
KOTA PADANG PANJANG


MARTONI, S. Sos, M. Si
NIP.19730304 199308 1 001



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Sutan Syahrir No. 178 Telp. (0752) 485152 Fax. (0752) 485152
Padang Panjang 27118

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **INDRA GUSNADY, SE, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **FADLY AMRAN, BBA**
Jabatan : **WALIKOTA PADANG PANJANG**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 11 Maret 2019
PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG

INDRA GUSNADY, SE, M.Si
Nip.19700804.199803.1.006

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Sultan Syarif No. 178 Telp (0752) 488152 Fax (0752) 488152
Padang Panjang 27118



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka ditetapkan sebagai berikut:

Nama : INDRU GUSNADY, SE.M.Si
Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : HADLY AMRAN, SE
Jabatan : WALI KOTA PADANG PANJANG

Salah satu tujuan PIHAK PERTAMA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan mewujudkan target kinerja yang selanjutnya disebut lampiran
perjanjian kinerja yang akan menjadi acuan bagi target kinerja yang akan ditetapkan sebagai salah satu indikator
dalam rangka pelaksanaan dan pencapaian target kinerja tersebut.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan melaksanakan evaluasi
terhadap pelaksanaan dan pencapaian target kinerja yang ditetapkan sebagai salah satu indikator
pencapaian dan keberhasilan.

Padang Panjang, 11 Maret 2019
PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG

INDRU GUSNADY, SE.M.Si
NIP. 9870804 199803 1 0000



PIHAK KEDUA
WALI KOTA PADANG PANJANG


HADLY AMRAN, SE

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketetapan Penyajian Laporan Keuangan Sesuai SAP	Tepat Waktu
2	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	5%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Peningkatan Pengelolaan Penganggaran Daerah	1.047.876.000
2.	Peningkatan dan Pengembangan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	470.310.600
3.	Peningkatan dan Pengembangan BMD	273.568.000
4.	Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah	1.627.200.000


WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 11 Maret 2019
**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**

INDRA GUSNADY, SE, M. Si
NIP. 19700804 199803 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

NO	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kelembagaan Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah SAP	100%
2	Peningkatan dan Perluasan Fungsi dan Peran Badan Pengelola Keuangan Daerah	Prestasi dan Perilaku Pegawai	80%

ANGGARAN
1.027.000.000
227.588.000
170.310.000
1.041.078.000

PROGRAM
4. Fungsi dan Peran Badan Pengelola Keuangan Daerah
3. Peningkatan dan Perluasan Fungsi dan Peran Badan Pengelola Keuangan Daerah
2. Peningkatan dan Perluasan Fungsi dan Peran Badan Pengelola Keuangan Daerah
1. Peningkatan dan Perluasan Fungsi dan Peran Badan Pengelola Keuangan Daerah

KOTA PADANG PANJANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Padang Panjang, 11 Maret 2019

INRA GUSNADY, S.E., M. Si
NIP. 197000041998071008

KOTA PADANG PANJANG

RIZKY AMRAN, BBA



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jln. Prof. M.Yamin, SH No. 88 Padang Panjang kode pos 27118
Telp. (0752) 82024 - Fax . (0752) 82024

Email : bkpsdm@padangpanjang.go.id - Website: www.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRA PUTRA, S.ST, MT
Jabatan : Pit. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA
Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG



FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 11 Maret 2019

PIHAK PERTAMA
Pit. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM KOTA PADANG PANJANG



BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SDM

HENDRA PUTRA, S.ST, MT
NIP. 19700107 199003 1 003

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
TADAN KESEHATAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA



Jl. Pahlawan Sutan Sjahrir Padang Panjang Kota pos 27112
Telp. (0752) 20224 Fax. (0752) 20224
e-mail: pmp@padangpanjang.go.id

PROTOKOL DAN KIBERJA TAHUN 2019

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang efektif, efisien dan ekonomis serta
pencapaian target yang ditetapkan dalam rencana ini

KELOMPOK KERJA
KEMENTERIAN KOTA PADANG PANJANG

KELOMPOK KERJA
KEMENTERIAN KOTA PADANG PANJANG

Sejak masa reformasi di Indonesia, telah terjadi perubahan paradigma
Pemerintah Kota Padang Panjang, yaitu dari paradigma lama yang berorientasi pada
kepentingan pemerintah semata-mata, menjadi paradigma baru yang berorientasi pada
kepentingan masyarakat luas. Perubahan ini menuntut pemerintah untuk melakukan
reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan efisiensi
pengelolaan keuangan. Untuk itu, diperlukan suatu sistem yang dapat mendukung
tercapainya tujuan tersebut. Salah satu sistem yang dapat mendukung tercapainya
tujuan tersebut adalah Sistem Informasi Manajemen (SIM). SIM adalah sistem yang
mampu menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses untuk
mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan efisien.

Padang Panjang, 11 Mei 2019
KELOMPOK KERJA
KEMENTERIAN KOTA PADANG PANJANG

KELOMPOK KERJA
KEMENTERIAN KOTA PADANG PANJANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Indeks Profesionalisme ASN	69

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 663.675.000
2.	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp 1.492.747.500
3.	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	Rp 39.872.500
4.	Pendidikan Kedinasan	Rp 649.000.000


WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN, BBA


Padang Panjang, 11 Maret 2019
PIR KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SDM
KOTA PADANG PANJANG

HENDRA PUTRA, S.ST, MT
NIP. 19700107 199003 1 003

PERJALAN KINERJA TAHUN 2019
 BAGIAN KEPERAWATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KOTA PADANG PANJANG

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Indikator Kinerja Utama (IKU)	80

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan	Rp. 50.000.000
2	Peningkatan Kompetensi Keperawatan	Rp. 1.000.000.000
3	Peningkatan Efisiensi Pelayanan	Rp. 30.000.000
4	Peningkatan Fasilitas	Rp. 500.000.000


 Kantor Kesehatan Kota Padang Panjang
 Jalan Pahlawan 111
 Padang Panjang, Sumatera Barat 26112
 Telp. (075) 820012

WILKON... JANG HAMPANG

 Kepala Dinas BSA



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JLN. KH. Ahmad Dahlan No.5 ☎ (0752) 82847 Guguk Malintang, Padang Panjang
Email : Bpbd.kesbangpol.pp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. ERIZAL, M.Si

Jabatan : KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG



FADLY AMRAN, BBA



Padang Panjang, 11 Maret 2019

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH, KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PADANG PANJANG



Drs. ERIZAL, M.Si
NIP. 19630805 198603 1 042



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 282 (0782) - 15843 Gugur, Padang Panjang
 Email: kcs@padangpanjang.go.id

PERALIHAN KEMERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mendukung transisi pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
 berorientasi pada hasil, yang berhadapan dengan tantangan yang dihadapi di bawah ini:

Nama	DR. ERIZAL M.SI
Jabatan	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG PANJANG
Selanjutnya dijabat oleh	PIHAK PERTAMA
Nama	FADY ALMAN, S.SA
Jabatan	WALIKOTA PADANG PANJANG

Sehingga alih jabatan PIHAK PERTAMA selanjutnya dijabat oleh PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA yang akan melanjutkan tugas kerjanya yang seharusnya sesuai ketentuan
 peraturan ini akan tetap mendapat tugas kerjanya yang terdapat dalam yang telah ditetapkan
 dalam dokumen perencanaan. Kehadiran dan kegiatan penerima tugas kinerja tersebut
 menjadi tanggung jawab sendiri.
 PIHAK KEDUA yang melanjutkan tugas yang diberikan serta akan melakukan evaluasi
 terhadap kinerja kerjanya dan kegiatan ini akan mengimprovisasi hasil yang dibutuhkan dalam rangka
 pemberian pelayanan dan sanksi.

Padang Panjang, 11 Maret 2019
PIHAK PERTAMA
 KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAERAH, KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK KOTA PADANG PANJANG

DR. ERIZAL M.SI
 NIP. 19630827196031042


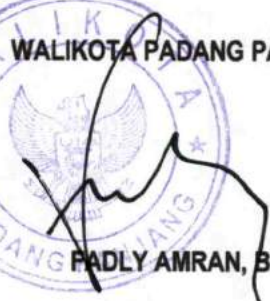
PIHAK KEDUA
 WALIKOTA PADANG PANJANG

FADY ALMAN, S.SA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya manajemen penanggulangan bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	50%
2	Meningkatnya kualitas keamanan dan kerukunan hidup di masyarakat	Persentase Penurunan kejadian konflik sosial	5%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1.756.381.000
2	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	116.730.000
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	160.313.400
4	Program Peningkatan Pemahaman Politik Masyarakat dan Stabilitas Politik Daerah	1.091.661.300


WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 11 Maret 2019
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PADANG PANJANG


Drs. ERIZAL, M.Si
NIP. 196308051986031042

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PADANG PANJANG

NO	SACARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan kualitas pelayanan dan ketahanan hidup masyarakat	Kemampuan Penemuan Vektor konflik sosial	5%
2	Meningkatkan kualitas pelayanan dan ketahanan hidup masyarakat	Kemampuan Penemuan Vektor konflik sosial	5%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Kewilayahan	180.000.000
2	Program Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan	180.000.000
3	Program Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan	180.000.000
4	Program Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan	180.000.000

KOTA PADANG PANJANG
KESETUAN BANGSA DAN POLITIK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
Padang Panjang, 11 Maret 2019

(Signature)

Dir. ERIZAL M.SI
NIP. 19830821988031042

KOTA PADANG PANJANG

(Signature)

Dir. AMAN RAHA



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

Jln. Rasuna Said No.04 Kampung Manggis Telp. (0752) 7020887 Padang Panjang

Email : kominfo.pdgpanjang@gmail.com

Website: www.padangpanjangkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OKSAH KEEBENDRIP, SH

Jabatan : CAMAT PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 11 Maret 2019

PIHAK PERTAMA
CAMAT PADANG PANJANG BARAT
OKSAH KEEBENDRIP, SH
NIP. 19780120 200604 1 012

KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG



Jl. Panyabungan No. 01 Padang Panjang Telp. (0752) 7010887 Padang

Email: kecamatan@padangpanjangkota.go.id
Website: www.padangpanjangkota.go.id

PERJANJIAN KIMERA TAHUN 2019

Dalam rangka kerjasama menajutkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada masa yang berbeda-beda di bawah ini:

Nama : OKLAH KEBENDIRIP, SH
Jabatan : CAMAT PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya di satu PIHAK PERTAMA
Nama : RADLY AMRAN BBA
Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Sebagai dasar PIHAK PERTAMA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA setuju akan menandatangani perjanjian kerjasama yang selanjutnya sesuai lampiran
yang terlampirkan sebagai bentuk komitmen yang telah ditetapkan
dalam kerangka pemerintahan. Keterbatasan dan kegiatan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan menandatangani surat ini yang disahkan secara resmi melakukan evaluasi
terhadap pelaksanaan kerjasama dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
penerapan dan pengendalian anggaran dan sanksi.

Padang Panjang, 11 Maret 2019
PIHAK PERTAMA
CAMAT PADANG PANJANG BARAT

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

OKLAH KEBENDIRIP, SH
NIP. 19780120 200004 1 012

RADLY AMRAN BBA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	- Persentase Realisasi Anggaran SATIMISAKE	85%
		- Persentase tingkat partisipasi masyarakat	13%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Kelurahan Terhadap Pelayanan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	78

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	271.207.000
2.	Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	3.679.122.400
3.	Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan/Kelurahan	327.206.000
4.	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan	17.030.000
5.	Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	4.948.100.000


WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 11 Maret 2019
CAMAT PADANG PANJANG BARAT

OKSAH KEEBENDRIP, SH
NIP. 19661023 199312 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
KOTA PADANG PANJANG

NO	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat	70
2	2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	2.1. Jumlah Pengaduan Masyarakat	100
		2.2. Waktu Tanggap Pengaduan Masyarakat	100
3	3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	3.1. Jumlah Pengaduan Masyarakat	100
4	4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	4.1. Jumlah Pengaduan Masyarakat	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	771.207.000
2	2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	3.738.122.000
3	3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	307.202.000
4	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	17.031.000
5	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	4.946.100.000

Padang Panjang, 11 Maret 2019
CAMAT PADANG PANJANG BARAT

DOKAN REBENIRIP, SH
NIP. 9888123 199312 1 001

WALIKOTA PADANG PANJANG





**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR**

Jalan H. Sumanik No.1 Telp. (0752) 82894
Padang Panjang, 27124

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DONI RAHMAN, S.Pd.I

Jabatan : CAMAT PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 11 Maret 2019

PIHAK PERTAMA
CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
DONI RAHMAN, S.Pd.I
NIP. 19780120 200604 1 012

KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Jalan H. Sumantoro No. 1 telp. (0752) 82004
Padang Panjang 27124



PERJALANAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang diuraikan dalam peraturan daerah yang berlaku di daerah ini :

Nama : DON RAHMAN, S.Pd.
Jabatan : Camat Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang

Selama tahun 2019 PIHAK PERTAMA
Nama : RIZKY AMRAN, BBA
Jabatan : W. Kota Padang Panjang

Selama tahun PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dengan ini menyerahkan laporan kinerja yang sebenarnya sesuai lampiran
peraturan ini dalam bentuk - bentuk yang terlampir sebagai lampiran yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA, akan memberikan evaluasi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap laporan kinerja dan kegiatan ini dan menginformasikan yang diperlukan dalam rangka
komitmen di tingkat daerah

Padang Panjang, 11 Maret 2019
CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
DON RAHMAN, S.Pd.
NIP. 19780120 20004 1 012

WALIKOTA PADANG PANJANG
RIZKY AMRAN, BBA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase Realisasi Anggaran - SATIMISAKE	32,11
		Persentase tingkat partisipasi - masyarakat	15
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Kelurahan Terhadap Pelayanan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	78

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan/Kelurahan	308.045.500
2.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan	10.100.000
3.	Program Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	3.182.592.000
4.	Program Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	223.228.000
5.	Program Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	5.965.380.500


WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 11 Maret 2019
CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG

DONI RAHMAN, S. Pd. I
NIP. 19780720 200604 1 012

PERJALAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG

NO	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan pembangunan masyarakat	Persentase Realisasi Anggaran SAPMIS/PAKE	100
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat	100
3	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	300.000.000
2	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	100.000.000
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	3.100.000.000
4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	227.128.000
5	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	2.982.320.000

Padang Panjang, 11 Maret 2019
CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG

DONTI RAHMAN, S.Pd
NIP. 19780728 201204 1 012

WALUKOTA PADANG PANJANG

FADY AMRAN, BBA



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jln. Tabek Gadang Bukit Kandung Ganting No. Telp. (0752) 484250 Padang Panjang
Email:kominfo.pdgpjg@gmail.com –Website: www.padangpanjangkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. ARDONI

Jabatan : DIREKTUR RSUD

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 11 Maret 2019
PIHAK PERTAMA
DIREKTUR RSUD KOTA PADANG PANJANG


dr. ARDONI
NIP. 19720513 200501 1 009

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH



in: Jalan Gedung Bukit Kuning Gedung 1, Tel. (0752) 484250 Padang Panjang
E-mail: kominfo@padangpanjang.go.id - Website: www.padangpanjang.go.id

PERJALANAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mendukung kemajuan pembangunan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
memenuhi kebutuhan pelayanan yang berkualitas yang dilaksanakan di bawah naungan

Nama : AL ARDANI

Jabatan : DIREKTUR RASD

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN BBA

Jabatan : WALI KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA bekerja sama melaksanakan target kinerja yang sebelumnya sesuai dengan
peraturan yang telah ditetapkan. Pada tahun ini telah tercapai target kinerja yang ditetapkan
dalam hal ini dengan memperhatikan keterbatasan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menyebabkan hal yang harus diperhatikan

PIHAK KEDUA akan melakukan evaluasi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap kinerja yang telah dilaksanakan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang diperlukan dalam rangka
pembinaan dan peningkatan kinerja yang harus diperhatikan

Padang Panjang, 21 Maret 2019
PIHAK PERTAMA
DIREKTUR RASD KOTA PADANG PANJANG

PIHAK KEDUA
WALI KOTA PADANG PANJANG



FADLY AMRAN BBA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan RSUD	Penilaian Akreditasi RSUD sesuai dengan Standar Akreditasi versi SNARS 1	Madya

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	52.000.000.000
2	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS	13.495.950.000


WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 11 Maret 2019
**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**


dr. ARDANI
NIP. 19720513 200501 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan RSUD	Pelayanan Akreditasi RSUD sesuai dengan Standar Akreditasi versi SNARS 1	Madya

ANGGARAN
52.000.000.000
19.498.950.000

NO
1
2
PROGRAM
Peningkatan dan Pelayanan Kesehatan RSUD
Pegadaian, Perbaikan, Peningkatan dan Pelayanan RS

Padang Panjang, 11 Maret 2019
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA PADANG PANJANG



IP. 1973 dan 200501 1 000

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN BBA